DRS. BAMBANG SUMADIO

BUNGA RAMPAI PERMUSEUMAN
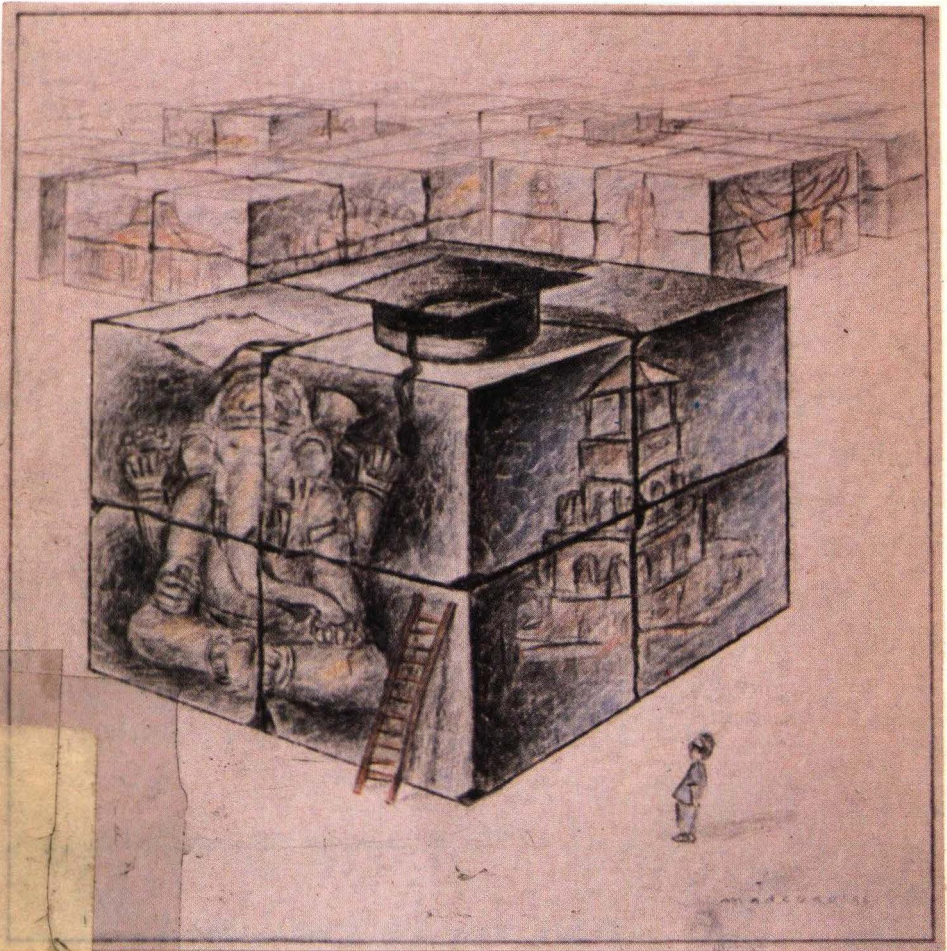
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT PERMUSEUMAN
TAHUN 1996 / 1997

BUNGA RAMPAI PERMUSEUMAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT PERMUSEUMAN
TAHUN 1996 / 1997

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Salah satu usaha Pembinaan dan Pengembangan Permuseuman di Indonesia yang didukung dana Proyek Pembinaan Permuseuman Tahun anggaran 1996/1997 adalah menerbitkan buku "Bunga Rampai Permuseuman".

Buku ini dihimpun dari Artikel Majalah Museografia. Laporan Seminar Pemugaran dan Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, buku Pusaka Art of Indonesia, Indonesian Heritage Ancient History dan naskah-naskah yang disusun oleh Alm. Drs. Bambang Sumadio.

Hasil penerbitan buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk peningkatan pengetahuan pada umumnya dan perkembangan permuseuman di Indonesia pada khususnya.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan buku ini kami ucapkan terima kasih dan tak lupa ucapan terima kasih kepada Ibu Sri Rondiati Bambang Sumadio yang telah ikut membantu tersusunnya buku ini.

Jakarta, Januari 1997

Pemimpin Proyek Pembinaan
Permuseuman Jakarta

ttd.

Drs. Agus
NIP. 130517287

Kata Sambutan

Masalah yang dihadapi dalam usaha pengembangan Permuseuman di Indonesia meliputi berbagai segi. Salah satunya keterbatasan bahan literatur untuk mendapat ide dalam pengembangan permuseuman.

Melalui proyek Pengembangan Permuseuman Jakarta tahun anggaran 1996/1997 diterbitkan buku "Bunga Rampai Permuseuman" yang digunakan sebagai tambahan bahan literatur untuk membantu meningkatkan informasi dan ilmu pengetahuan permuseuman.

Semoga dengan terbitnya buku ini dapat menambah wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan permuseuman bagi pembacanya.

Pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada kelompok kerja atas jerih payahnya yang telah menghimpun artikel dan naskah Alm. Drs. Bambang Sumadio hingga terbitnya buku ini.

Jakarta, Januari 1997
Direktur Permuseuman

ttd.

Drs. Tedjo Susilo
NIP. 130352848

STRATEGI DASAR KEBIJAKSANAAN DIREKTORAT PERMUSEUMAN

I. Pendahuluan

Berkat Pembangunan Nasional yang direncanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Lima Tahun, telah tercapai tingkat kemajuan material serta spiritual dalam masyarakat Indonesia, yang juga membawa dampak pada perkembangan kebudayaan. Perkembangan kebudayaan tersebut, selain merupakan hasil positif dari usaha pembangunan kebudayaan, dalam dirinya menampilkan berbagai tantangan. Sudah sewajarnya apabila di dalam usaha pembangunan kebudayaan, berbagai dampak dan tantangan dapat diperhitungkan sebelumnya sejauh mungkin, agar akibat negatif yang timbul dapat dikurangi semaksimal mungkin.

Direktorat Permuseuman sebagai salah satu unsur dalam jajaran unit kerja yang melakukan pembangunan kebudayaan, perlu merumuskan pegangan kerja dengan jangkauan dan ruang lingkup yang menyeluruh. Dengan pegangan kerja ini, tugas dan fungsi Direktorat Permuseuman akan dapat dilaksanakan secara konsisten dan terpadu dengan unit kerja lain yang relevan.

Pegangan kerja Direktorat Permuseuman, menjadi pegangan dalam pelaksanaan pembinaan teknis permuseuman secara menyeluruh, berdasarkan tugas dan fungsi Direktorat Permuseuman, serta acuan-acuan kebijaksanaan umum, maupun kebijaksanaan dasar pembangunan kebudayaan dan pendidikan nasional. Pegangan kerja yang menyeluruh ini menjadi pegangan dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat, baik yang dibiayai oleh anggaran rutin maupun oleh anggaran

pembangunan dalam usaha pembinaan sistem permuseuman di Indonesia.

Kegiatan pembinaan permuseuman itu meliputi dasar-dasar hukum yang diperlukan, sarana dan prasarana, termasuk di dalamnya pelayanan administratif. Selain sebagai pegangan dalam pembinaan teknis permuseuman, pegangan kerja ini juga sebagai landasan ideal untuk mencapai tujuan seperti berikut :

1. Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa yang dijiwai oleh falsafah Pancasila dengan meningkatkan peranan museum sebagai pusat Studi Ilmiah, dalam rangka memantapkan, serta mendorong penalaran dan sikap positif terhadap pengembangan ilmu dan teknologi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan proyek-proyek pengembangan permuseuman daerah.
2. Mewujudkan sikap dan langkah yang mantap, dalam melaksanakan tugas secara optimal, yang menunjang usaha pemerintah untuk mewujudkan kebudayaan nasional.

Pegangan kerja ini dilengkapi dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan.

II. Dasar-dasar

Tugas Direktorat Permuseuman berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0222e/0/1980, Bab V, Pasal 81, dan 82 adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Kebudayaan di bidang Permuseuman, berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Permuseuman mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang permuseuman dan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap museum.
2. Melaksanakan kegiatan dan pembinaan permuseuman , yang meliputi pemeliharaan, penyajian, pengamanan, registrasi, dokumentasi, perpustakaan, publikasi, dan penerangan di bidang permuseuman.

3. Melaksanakan urusan tata usaha Direktorat.

Ketetapan mengenai tugas dan fungsi Direktorat Permuseuman tersebut di atas, telah menjadi pegangan bagi Direktorat untuk melaksanakan kegiatan dalam Pembangunan Nasional, khususnya Pembangunan Kebudayaan Nasional.

Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pelaksanaannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, kiranya dapat dikutip beberapa hal yang relevan dengan kegiatan pembinaan permuseuman yang butir-butirnya sebagai berikut :

1. Nilai budaya Indonesia, yang mencerminkan nilai luhur bangsa, harus dibina dan dikembangkan untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional, serta memperkokoh jiwa kesatuan.
2. Kebudayaan Nasional terus dibina dan diarahkan pada penerapan nilai-nilai kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila.
3. Dengan timbulnya kebudayaan bangsa yang berkepribadian dan berkesadaran nasional, sekaligus dapat dicegah nilai-nilai sosial budaya yang bersifat feodal dan kedaerahan yang sempit, serta ditanggulangi pengaruh kebudayaan asing yang negatif, sedang di lain pihak ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk menyaring dan menyerap nilai-nilai dari luar yang positif, yang memang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan.
4. Usaha-usaha pembauran bangsa perlu lebih ditingkatkan disegala bidang kehidupan, baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya, dalam rangka usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta memantapkan ketahanan nasional.
5. Tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan, serta kemanfaatan nasional, tetap dipelihara

dan dibina untuk memupuk, memperkaya, dan memberi corak khas kepada kebudayaan nasional.

Adapun pelaksanaan pengembangan kebudayaan nasional bertumpu pada kebijaksanaan umum sebagai berikut:

1. Kelangsungan Hidup Berbudaya.

   Kelangsungan hidup berbudaya merupakan usaha yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan kehidupan bangsa yang bersatu, berkepribadian nasional, dan tanggap terhadap segala tantangan kemajuan teknologi dan perkembangan jaman. Oleh sebab itu, pembangunan kebudayaan dalam rangka perwujudan wawasan nusantara memungkinkan pengembangan berbagai corak ragam budaya sebagai modal dan landasan pengembangan seluruh budaya bangsa.

2. Pemanfaatan Kebudayaan Nasional

   Pemanfaatan kebudayaan nasional merupakan usaha agar hasil kebudayaan dapat dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat secara merata. Seluruh anggota masyarakat perlu diarahkan agar dapat berkarya secara kreatif.

   Pelaksanaannya dilakukan dengan mengikutsertakan tanggung jawab dan kerjasama yang nyata dari segenap anggota masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

3. Kemajuan Adab, Budaya, dan Persatuan.

   Kemajuan adab, budaya, dan persatuan, merupakan usaha untuk menumbuhkan sikap, mengembangkan, dan memperkaya kebudayaan bangsa Indonesia, agar menjadi bangsa yang maju dan berbudaya, kuat dan terhormat, serta bersatu.

Dalam kenyataannya, sudah sejak awal museum selalu mengandung aspek pendidikan. Dalam perkembangannya di zaman modern, aspek tersebut semakin menonjol. Oleh karena itu, dalam usaha membina dan mengembangkan permuseuman di Indonesia, kebijaksanaan dasar pembangunan pendidikan nasional merupakan hal yang sangat relevan.

Adapun butir-butir yang relevan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, sehingga dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
2. Dalam rangka meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda, sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta, wajib memberikan pendidikan sejarah perjuangan bangsa.
3. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
4. Pendidikan luar sekolah, yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan, termasuk kepramukaan, latihan-latihan keterampilan, dan pemberantasan buta huruf, dikembangkan dan diperluas dengan meningkatkan pendayagunaan sarana dan prasarana.

Tidak berbeda dengan pelaksanaan pengembangan kebudayaan nasional, pembangunan pendidikan nasional pun dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan umum sebagai berikut:

1. Pendidikan Seumur Hidup.

   Seluruh usaha dan kegiatan pendidikan dan kebudayaan berjalan secara terus-menerus dan berlangsung dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Usaha kegiatan itu menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga , masyarakat, pemerintah, dan dilaksanakan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

2. Pendidikan Semesta, Menyeluruh, dan Terpadu
Semesta berarti bahwa usaha dan kegiatan pendidikan meliputi semua unsur kebudayaan. Menyeluruh berarti bahwa seluruh usaha dan kegiatan pendidikan meliputi semua jenis dan jenjang pendidikan, baik pendidikan di dalam maupun di luar sekolah. Terpadu berarti bahwa seluruh usaha dan kegiatan pendidikan mempunyai kejelasan kaitan fungsional dan hubungan berurutan antar jenjang dan antar jenis, dan antara jenis dan jenjang pendidikan, serta serasi dengan pembangunan nasional.

3. Kemajuan Adab, Budaya, dan Persatuan

   Usaha kegiatan pendidikan ditujukan untuk membina sikap dalam rangka mengembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang maju dan berbudaya, kuat dan terhormat, serta bersatu.

Dasar-dasar tersebut, selanjutnya masih perlu dilengkapi dengan kebijaksanaan teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan, serta pengarahan teknis lainnya, yang tertuju kepada pembinaan yang lebih spesifik.

III. Program

Untuk melaksanakan pembinaan, kegiatan Direktorat Permuseuman dilaksanakan dalam program-program yang merupakan bagian dari pembinaan serta sistem permuseuman. Secara garis besar program itu terdiri dari :

1. Program Pembinaan Organisasi.
   Usaha ini meliputi penyusunan peraturan dan perundang-undangan yang menjadi dasar fungsionalisasi museum-museum di Indonesia, serta pemantapan pelaksanaan teknis.

2. Program Pembinaan Sarana dan Prasarana
   Usaha ini meliputi pembangunan fisik dan pengadaan perlengkapan penunjang manajemen maupun fungsionalisasi.

3. Program Pembinaan Ketenagaan

Usaha ini meliputi perencanaan, pengadaan, pembinaan, dan pengembangan ketenagaan museum secara kualitatif maupun kuantitatif, yang meliputi pendidikan dan latihan pada pendidikan formal maupun berbagai jenis penataran atau kursus, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

4. Proram Pembinaan Fungsionalisasi

   Fungsionalisasi adalah pengelolaan teknis permuseuman. Usaha ini merupakan pembinaan, pengembangan, serta pengawasan terhadap fungsionalisasi museum-museum yang secara teknis berada di bawah pembinaan Direktorat Permuseuman.

5. Program Pembinaan Administrasi

   Usaha ini meliputi pembinaan dan pengembangan pelayanan administrasi Direktorat Permuseuman agar dapat mengimbangi tuntutan kemajuan dalam pembinaan dan pengembangan sistem permuseuman khususnya, dan manajemen di bidang kebudayaan pada umumnya.

IV. Penutup

Pegangan kerja ini menjadi operasional dengan dilengkapi pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis, serta petunjuk pelaksanaan yang diperlukan. Selain itu, penyempurnaan-penyempurnaan akan tetap diperlukan berdasarkan umpan balik dari pengalaman pelaksanaan.

Kesemuanya ini merupakan strategi dasar kebijaksanaan pengembangan permuseuman yang secara ringkas dapat digambarkan dalam diagram seperti terlampir.

STRATEGI DASAR KEBIJAKSANAAN
PENGEMBANGAN PERMUSEUMAN
DASAR DASAR
TUGAS DAN FUNGSI
SISTEM PERMUSEUMAN
ORGANISASI
SARANA
FUNGSIONALISASI
TUJUAN
PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN
MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA

Pertemuan Kepala-kepala museum se Indonesia membahas kebijakan Permuseuman

FUTURE ORIENTED CULTURAL POLICIES AND MUSEUM DEVELOPMENT PROGRAMS

As we may note from existing cultural policies in various countries, each nation has its own conception. This conception is determined by various factors, such as geographical configuration, socio-economic system, technological development, and political ideology.

Considering the above mentioned, discussing cultural policies means speaking about a wide variety of subject matters, which within the limited scope of this seminar might result in a vague treatment of such an important subject. Therefor, I will limit myself to the case in Indonesia which is more fimiliar to me personaly.

Like many Southeast Asian Countries Indonesia has a multi racial society. A cultural policy is therefor relevant. The more so since the constitution explicitly mentions that the government promote the national culture of Indonesia (article 32).

If we examine the multiplicity of culture in Indonesia, we may categorize it as follows :

a. Ethnic culture, is culture which grows, develop and is borne by an ethnic group.

b. Local or regional culture, is culture which resulted from social intercourse between various ethnic groups in a region.

c. National culture grows and develop as a national frame of reference which unify the whole of Indonesia as one nation state after its proclamation of independence.

All three categories are still to be seen in an active state. The third

category is in the process of development. to these three categories we may add one more which is perhaps more related to what museum try to accomplish, namely the ancient culture which flourish in the past. The remains of which we still may admire, and are cited many times as an inspiration in the quest of values to be develop in the national culture.

In the clarification of the articles in the constitution it is stated among other things that ancient indiginous culture which comprises of the best elements of the various regional cultures in the past is regarded as national culture. This clearly indicates that the founding fathers of the Republic were well aware of the treasure of norms and values which are stored in ancient cultures. But what than indicates the orientation toward the future in these thought about national culture? For this we again have to refer to the clarification of article 32 of the Constitution.

The clarification further stated that cultural activities should lead toward the advancement of civilization, culture and unity, without rejecting new elements which originate from foreign cultures which may develop or enrich the national culture, and raise the degree of humanity of the Indonesian nation.

These statements on the principles of the development of national culture stated in the constitution, forms the constitutional base for the formulation of guidelines for the implementation. These principles are broad principles which should be defined toward the achievement of certain goals. This is done at the highest state in the Decree of the People's Consultative Assembly which is formulated at the beginning of each Five Year Development Period. The Decree is the Guidelines of State Policy during a priod of five years and covers all fields of development.

As part of the overall five year plan, policies on the promotion and development of culture are conceptualy linked with plans for the development of other sectors. Such as the sector of tourism which has a definite economical bias, while showing cultural aspects. Its closest link is withouth doubt with education. Both come under the same administrative structure, namely The Department of Educations and Culture.

Having a clear constitutional base for cultural development, it seems that everything will proceed smoothly. In reality it is not always as smooth

as we would like it to be. Problems will be encountered which are financial, administrative or institutional in nature. Although Indonesia has a national language which is stated in article 35 of the constitution, ethnic languages are still used by the respective ethnic groups, especialy in the process of transfering traditional cultural values. In this respect ethnic languages still has a role fulfil. In its cultural policy, the government has adopted a stand point in which ethnic cultures, including its languages, are free to develop as long as the communitites are also in support of its existence. If an ethnic culture does not have anymore reason for its existence, it will continue its ecistence as a subject for scholarly research in documentary preservations in museums and other institutions of research and preservation. Lately the government has embarked on a project for the preservation of the literary treasure of several ethnic cultures which have written literary traditions.

The preservation of written literary tradition includes translation into the national language. This may sound odd, but it shows the orientation toward the future of the cultural policies persued. Translations means that the wisdom of the past as preserved in those literary works will become accesscible to everybody who understand Indonesian.

In connection with the preservation of literary traditions problems may arise if the emphasis is more toward the revival of old customs which have become meaningless, instead of concentrating on understanding traditional cultures through scholarly work.

Refering back to matters on the influence of foreign cultures, the government put more emphasis on strengthening cultural recilience through activites in this field. In this connection, the Directorate General of Culture is working on a broad base which not only covers aspects of fine art, but also other aspects of culture which usualy is the domain of anthropologists.

Beside endeavours implemented by the government, private initiative in the field of cultural development is quite substancial, although the government maintains a close watch bearing in mind past experience of political and ideological infiltrations through art activities.

We may now refer to museums in this constellation. Museums should play a prominent role in the implementation of cultural policies,

particularly those which concerns itself with the preservation of cultural heritage in all its aspects. Not only the aspect of fisical preservation, but also in the preservation of creative cultural skills.

Before we define what we may understand by the term future oriented museum development programs, I would like to draw the attention to the fact that museums are not yet well understood by the general public here. It is therefore imperative to project a correct public immage. Curators and other museum personnel can tell amusing anecdotes about the ignorance of part of the public about museums. This condition is of course not every where the same. Regions with a long scholarly traditon may be more aware about certain aspects of museum work.

Future oriented museum development programs in Indonesia should in the first place be closely related with development programs in the field of general education. Development programs in the field of general education are by its nature oriented toward the future.

Although oriented towards the future it should be firmly anchord in the present realities. We have the experience that a too advanced museum design creates problems in the maintenance.

Actualy a future oriented museum development program should be more concentrated in the first place toward the creation of a museum system. That system should be totaly oriented towards the needs of the society it serves as a whole.

Secondly, the system should also be able to train a new kind of curators who beside being good scholars and research workers are aware of the needs of his public in the context of the total development of the nation.

Future oriented museum development programs should consider the advances in sience and technology as well as in the social sciences and humanities. Man as a biological being as well as a social being is now better understood than before. And so is nature where man figures as part of a system.

Lately, the public has come in the focus of museum research. This is very important in developing countries if museums are to play a role in support of formal education. In advanced countries this may mean that

the programs offered by museums are suplementary to the regular curriculum. But in many developing countries, museum programs may be the only means of teaching for a segment of society, because for various reasongs formal education is not available yet for them. In these circumstances outreach programs are very important.

In conclusion I would like to return to the part on cultural policies. Cultural policies are determined very much by the different approaches toward the problem of culture. Indonesia is fortunate to have a constitutinal reference in approaching cultural problems which figures very prominently in its nation and character building.

Foreign cultural influences are not rejected for its own sake. The empahsis in this relation is to enhance the ability of the Indonesian culture to absorb and digest selectively foreign cultural influences to strengthen and enrich the national culture. This has happened before in its history when Indonesian prehistoric culture come into contact with Indian culture in the archipelago. Both cultures changed and created the Borobudur.

A future oriented cultural policy is understood as a set of principles which give guidence in culturaly preparing the nation for the future.

Museums should function as part of the oberall pattern of cultural development. For developing countries it is preverable to have an integrated museum system to enable museums to give better service to its public.

Future oriented museum development programs should benefit from the advances of science and technology beside other branches of know-ledge.

MUSEUM DAN MASA DEPAN

I. Pendahuluan

Kita semua mengenal pemeo "dimuseumkan" yang diartikan tidak berguna lagi tetapi sayang kalau dibuang. Sebenarnya citra memuseumkan yang demikian itu keliru. *Pertama,* benda yang disimpan di museum sebenarnya adalah benda pilihan. Ia dipilih untuk menjadi wakil masa lampau di masa masa kini, serta masa di hadapan kita. Untuk dapat menjadi "wakil" itu, tentu benda tersebut berupa benda yang mempunyai sifat khusus sebagai atributnya. *Kedua,* benda yang telah dipilih itu tentu tidak akan dibiarkan rusak dan dijaga kelestariannya.

Semua yang tersebut di atas mengisyaratkan betapa pentingnya benda yang terpilih untuk menghuni suatu museum. Jauh dari gambaran benda usang yang tidak bermanfaat lagi.

Bagaimana dan siapa yang menentukan kriteria sesuatu benda memenuhi syarat untuk dilestarikan agar dapat menyampaikan pesan di masa-masa seterusnya.

II. Makna Koleksi Museum

Benda yang dijadikan koleksi museum tentulah suatu benda yang oleh penanggung jawab atau pemilik museum dianggap penting. Bahkan mungkin menimbulkan kebanggaan pada yang bersangkutan.

Adapun dasar rasa kebanggaan tersebut sangat beraneka ragam. Kebanggaan terhadap sebilah senjata yang diketahui telah berjasa dalam mengalahkan musuh tentu berbeda dengan kebanggaan memiliki lukisan Affandi. Kebanggaan memiliki koleksi kain tenun yang sudah langka berbeda pula dengan memiliki koleksi kain tenun kreasi baru yang pertama beredar di pasaran. Kebanggaan memiliki contoh batu-

batuan berbeda dengan memiliki koleksi perhiasan peninggalan keluarga istana. Namun ada persamaan, yaitu benda-benda koleksi yang dibanggakan itu pada umumnya unik. Ada sesuatu yang khas dan tak ada duanya.

Keunikan atau kekhasan itu mempunyai atribut yang berbeda-beda. Mungkin karena peran yang pernah dimainkan benda koleksi itu, karena kelangkaannya atau karena keindahannya yang luar biasa atau gabungan dari ketiganya.

Sifat-sifat seperti yang diuraikan di atas terdapat pula pada koleksi pribadi. Namun koleksi pribadi berbeda dengan koleksi museum yang sebenarnya, sekalipun ia berawal dari suatu koleksi pribadi.

Suatu koleksi pribadi terbina untuk memuaskan keinginan serta selera pribadi yang bersangkutan. Yang terutama merasakan kepuasan adalah pemilik koleksi tersebut.

Dalam koleksi museum tidak pula dapat dihindari sepenuhnya selera subjektif dalam menghimpun koleksi. Namun tujuan menghimpun koleksi itu adalah bagian dari pelayanan masyarakat museum yang bersangkutan. Dengan demikian maka makna koleksi museum sebenarnya tercermin pada apresiasi masyarakat sebagai tanggapan terhadap intensi penyaji koleksi. Dalam hubungan ini sangat mendasar pentingnya pemahaman para pengelola mengenai fungsi museum serta makna koleksi di dalamnya.

Bagi masyarakat awam museum pertama-tama tampil sebagai tontonan. Hal ini harus benar-benar disadari oleh para pengelolanya. Oleh karena itu harus diusahakan agar penyajian di museum cukup menarik sebagai tontonan.

Museum sebagai tontonan tentu berbeda dengan tontonan yang lajim, misalnya seni pentas, sirkus, pertunjukan sebuah orkes dan sebagainya. Untuk dapat menikmati sajian di museum perlu ada partisiapsi intelektual pada penonton. Misalnya kemampuan berimajinasi. Dalam hubungan ini dapat difahami bahwa apresiasi pengunjung museum berbeda-beda menurut latar belakang yang bersangkutan, misalnya latar belakang pendidikan. Dengan kata lain, makna koleksi bagi pengunjung juga berbeda-beda.

Makna koleksi bagi pengelola museum berbeda dengan makna koleksi bagi pengunjung. Bagi pengelola museum koleksi adalah unsur dari suatu gagasan atau kisah yang dikomunikasikan kepada pengunjung. Selain itu, koleksi juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri, selain dalam paparan yang didasari suatu alur ceritera. Oleh karena itu, bagi pengelola museum, selain pemahaman fungsi museum, sangat perlu pula pemahaman terhadap koleksi. Seorang koraktor museum Belanda menulis sebuah karangan berjudul "De toal der, Dingim", atau bahasa benda, yang dimaksudkan adalah apa yang dapat diungkapkan oleh benda dalam suatu tata pameran.

Ada suatu disiplin ilmu yang dalam mencapai tujuannya sangat bertumpu pada pemahaman mengenai "benda". Baik itu benda budaya (artefak) atau benda lain yang berperanan dalam kehidupan manusia, misalnya flora dan fauna dalam ekologi manusia. Ilmu arkeologi serta etnologi sangat mementingkan pemahaman itu. Untuk dapat menyusun penyajian yang lengkap kedua cabang ilmu itu masih perlu dilengkapi pengetahuan yang berasal dari ilmu sejarah, biologi geografi dan cabang ilmu seperti numismatik, epigrafi dan sebagainya.

Banyaknya ilmu yang bekerja untuk menegaskan makna koleksi tidak berarti bahwa diperlukan sekian banyak ahli dalam berbagai ilmu. Hal itu hanya berarti bahwa seorang pengelola museum, serta pengelola koleksinya perlu mempunyai dasar pengetahuan yang luas. Ia merupakan perpaduan antara guru dan peneliti. Dasar disiplin ilmu yang dimiliki tidak merupakan penentu utama, yang lebih penting adalah keinginan tahu dan kemampuan mengikuti penalaran ilmiah.

Selain oleh kriteria-kriteria tersebut di atas, makna koleksi juga memerlukan ahli tata pameran, ahli komunikasi serta ahli edukasi untuk menampilkannya.

Dari uraian di atas kiranya menjadi jelas bahwa makna koleksi suatu museum tidak dengan sendirinya tampil dan mendapat apresiasi dari pengunjung. Tetapi diperlukan pemahaman koleksi serta kreatifitas untuk menciptakan suatu situasi yang komunikatif antara museum dan pengunjung.

III. Munuju Masa Depan Serta Hambatannya.

Berbicara mengenai menuju masa depan bagi museum tidak berbeda dengan masalah-masalah di bidang lain. Museum menghadapi proses perkembangan dalam dirinya maupun masyarakat pengunjungnya jika kedua perkembangan tersebut tidak seirama, maka akan muncul berbagai kesulitan.

Salah satu perkembangan yang dihadapkan langsung pada museum adalah keanekaan jenis pengunjung. Keanekaan ini bukan hanya terdapat pada pengunjung dari masyarakat itu sendiri, tetapi juga dari masyarakat mancanegara yang semakin banyak datang ke negeri kita.

Jika aneka pengunjung ini dijajarkan dalam suatu susunan kategoris, akan tampak aneka perbedaan yang membentang dari yang masih tradisional sampai anggota negara industri maju. Lalu kita bertanya: Pengelola museum termasuk kelompok yang mana?

Sebaiknya mereka yang bertanggung jawab dapat menempatkan dirinya pada tempat yang benar. Kita harus dapat dengan jujur melihat posisi kita, dan selanjutnya menuju pada keadaan yang lebih maju.

Kata globalisasi hampir setiap hari kita dengar. Untuk dapat menuju ke depan museum pun harus melihat kedudukannya dalam proses tersebut.

Berbagai hambatan masih harus dihadapi dalam usaha mengembangkan museum. Ada hambatan organisatoris, finansial kemampuan teknis. Namun hambatan-hambatan tersebut tidak akan menjadi masalah yang tidak dapat diatasi jika pemahaman petugas museum mengenai hakekat museum sudah baik. Petugas museum harus faham mengenai fungsi museum sebagai lembaga, faham mengenai makna koleksi, dan mempunyai persepsi tentang museum dalam perkembangan masyarakat yang sedang terjadi. Sesungguhnya hambatan pada pihak museum yang tampaknya perlu diatasi dalam menuju ke masa depan adalah hambatan sikap mental petugas museum yang tidak berorientasi pada kemajuan. Misalnya terlalu terikat pada tatacara yang sudah melembaga walaupun semua orang dapat melihat

bahwa sistem tersebut lebih banyak mengandung hambatan dari pada kesempatan.

IV. Wawasan Nusantara dan Masa Depan

Kita dapat bertanya apa sebenarnya makna wawasan nusantara bagi museum. Masyarakat Indonesia masih dalam perkembangan untuk menjadi Negara Bangsa (Nation State) yang mantap. Salah satu "issue" dalam perkembangan itu adalah Kesatuan dan Persatuan Bangsa. Salah satu dasar yang penting dalam pembentukan kesatuan dan persatuan bangsa adalah pemahaman serta saling menghargai oleh berbagai suku bangsa di Indonesia terhadap kebudayaan masing-masing. Kata orang: Seeing is bilieving" Museum sebagai tontonan dapat menyediakan proses tersebut melalui berbagai pameran yang disusun dengan wawasan Nusantara. Yang ideal adalah pameran Wawasan Nusantara tersebut diselenggarakan dengan frekuwensi frekuensi yang memadai (2x setahun) dengan tema yang berbeda. Jika pameran demikian didukung oleh panerbitan yang baik, dampaknya akan nyata.

Pameran Wawasan Nusantara, selain berperanan dalam konteks kesatuan dan persatuan bangsa, juga merupakan manifestasi menuju ke masa mendatang.

Dalam keberadaannya sebagai Nation State gejala globalisasi tidak akan mengakibatkan tercabik-cabiknya masyarakat kita karena perbedaan persepsi mengenai jati diri masing-masing bagian masyarakat. Misalnya karena munculnya falidatitas dengan fihak lain yang tampil sangat menarik dan datang sebagai ujung-ujung komunikasi di rumah tangga kita. Contoh lain misalnya faham hak asasi dan perdagangan bebas yang dikecam oleh Perdana Menteri Malaysia di Venezuela karena disebarluaskan di seluruh dunia hanya dengan satu versi, yaitu versi negara Industri barat. Padahal sesungguhnya masih ada pilihan lain.

V. Penutup

Uraian di atas ingin memberi gambaran bahwa museum bukanlah suatu lembaga pelengkap belaka agar masyarakat tampak berbudaya.

Museum yang baik akan menyebarkan falsafah yang dianut bangsa yang memilikinya. Museum barat tentu berfaham liberal, museum di Cina (RRC) berfaham Marxis Lenimis, dan seterusnya.

Museum Indonesia memancarkan Pancasila serta mengikuti irama perkembangan masyarakatnya. Jika suatu museum menampilkan koleksi kerajaan, bukan berarti ia sedang mengagungkan feodalisme, ia hanya menyatakan fakta bahwa hal demikian merupakan bagian dari khasanah budaya kita.

Dalam mengantisipasi berkembangnya mayarakat industri di Indonesia, museum sebaiknya mengurangi penyajian yang kurang rasional, dan lebih berorientasi pada perkembangan sains dan teknologi maupun iklim yang ditumbuhkannya di masyarakat.

MUSEUM SEBAGAI KOMUNIKATOR

I. Pendahuluan

Museum adalah pengawal warisan budaya. Dalam arti pengawalan terkandung makna bahwa warisan budaya itu juga ditampilkan kepada masyarakat. Dalam hubungan ini tidak berlebihan jika museum juga disebut cagar budaya jika ia melestarikan warisan budaya dan menampilkannya kepada masyarakat.

Dalam perkembangannya museum tidak hanya berhubungan dengan benda-benda warisan budaya dalam arti yang khusus, tetapi juga dalam arti yang luas. Ia meliputi museum yang mengkhususkan diri pada teknologi peristiwa-peristiwa sejarah, dan tokoh-tokohnya. Bahkan pada saat ini sedang tumbuh konsep-konsep museum yang baru yang bertujuan menampilkan kehidupan dengan cara yang lebih utuh dan memasukkan unsur keikutsertaan pengunjung. Dengan demikian pengunjung tidak hanya "mengalami" museum secara kognitif, tetapi evokatif. Namun apapun bentuk museum, yang merupakan fungsi pokoknya terhadap pengunjung adalah berkomunikasi.

II. Komunikasi Museum

Setiap komunikasi merupakan usaha untuk menyampaikan pesan yang bermakna. Jika komunikasi itu terselenggara maka diharap akan terjadi suatu sistuasi yang baru pada penerima pesan.

Dalam konteks tersebut di atas, semua hubungan antara meseum dengan pengunjung harus diartikan sebagai komunikasi. Dan hal ini melahirkan suatu tolok ukur khusus. Tolok ukur itu berupa satuan yang menggambarkan keberhasilan komunikasi. Oleh karena komunikasi

adalah suatu proses maka setiap fase dalam proses itu harus digarap dengan sesempurna mungkin. Yaitu dari mulai konsep pesan, penyajian, serta evalausi keberhasilan proses itu.

Pesan yang disampaikan dalam komunikasi adalah sejumlah informasi yang disusun dengan bentuk tertentu. Ia dapat sepenuhnya berbentuk verbal atau berupa paduan antara verbal dan visual. Bahkan komunikasi dapat juga sepenuhnya ditujukan pada indra penglihatan. Museum dapat melakukan berbagai jenis komunikasi tersebut. Bahkan dengan media komunikasi yang beraneka pula. Tetapi apakah arti berbagai cara komunikasi itu jika informasi yang merupakan unsur-unsur pesan yang disampaikan tidak jelas.

Beban kewajiban untuk menyampaikan informasi yang baik dan benar lebih-lebih menjadi tanggung jawab museum-museum yang dibiayai oleh dana masyarakat yaitu semua museum pemerintah. Tugas berkomunikasi pada museum pemerintah bukan hanya masalah teknis fungsional museum, tetapi mengandung unsur pengabdian masyarakat yang amat menonjol. Sampailah kita kepada pertanyaan: "Apakah yang dikomunikasikan, dan bagaimana pesan disusun?"

III. Dasar Komunikasi Museum

Dasar utama dari komunikasi museum adalah filsafat dasar atau dasar ideal masing-masing museum.

Tiap museum adalah suatu unikum. Sifat ini terjadi karena koleksi setiap museum lain. Kalau ada persamaan maka hal itu sangat terbatas. Tidak pernah didirikan museum yang sepenuhnya merupakan tiruan dari museum lain. Kalau pun ada standarisasi permuseuman, maka hal itu hanyalah dalam arti administratif. Dalam fungsionalisasi, standar diartikan sebagai tingkatan mutu. Filsafat dasar setiap museum berhubungan dengan tujuan museum itu didirikan dan jenis koleksi di antara berbagai museum merupakan petunjuk akan persamaan filsafat dasar.

Sebuah museum yang menyimpan dan memamerkan alat-alat perang dapat merupakan sebuah museum angkatan perang, tetapi dapat pula merupakan museum yang berhubungan dengan peperangan tertentu. Pada kasus pertama, merupakan sumber informasi mengenai

suatu organisasi, yaitu angkatan perang. Sedang pada kasus kedua, disajikan informasi mengenai peristiwa tertentu yang dialami oleh organisasi itu.

Pada kasus pertama dianut filsafat dasar untuk memberi rasa bangga terhadap angkatan yang menyebabkan negara serta rakyat dapat hidup aman sentausa. Pada kasus kedua mungkin filsafat dasarnya adalah membangkitkan jiwa kepahlawanan.

Seluruh komunikasi suatu museum merupakan penjabaran dari filsafat dasar tersebut. Tanpa filsafat dasar amat sulit untuk merumuskan komunikasi museum. Dan museum tanpa filsafat dasar tidak banyak berbeda dengan tempat memajang benda antik.

IV. Penyusunan Komunikasi Museum

Dari berbagai museum di negara yang telah maju dalam bidang permuseuman, masih sering terdengar keluhan bahwa banyak kurator secara egoistis hanya meneliti hal-hal yang menarik bagi dirinya. Hal ini dirasakan amat tidak pantas, lebih-lebih pada museum-museum yang dibiayai oleh dana masyarakat, yaitu museum pemerintah. Di lain pihak terdapat dampak museum yang menganut filsafat dasar yang jelas, serta menampilkannya dalam informasi yang disusun dalam bentuk pesan pada pameran mereka. Ada museum etnologi yang menitikberatkan pada kesamaan umat manusia dan menganjurkan saling mengerti antar budaya. Sebaliknya, ada museum etnologi yang cenderung menunjukkan tingkat perbedaan antar negara maju (barat) dengan dunia lainnya (dunia ketiga), dengan mengabaikan sama sekali kenyataan bahwa kalangan masyarakat tertentu di dunia ketiga sudah tidak banyak berbeda dengan dunia barat dalam hal-hal tertentu.

Kita dapat setuju atau tidak setuju dengan filsafat dasar suatu museum. Namun jelas bahwa di museum, yang termasuk staf Edukasi serta staf bagian penyajian bekerja berdasarkan suatu filsafat dasar. Semua kegiatan yang akhirnya bermuara pada pameran (yaitu suatu bentuk komunikasi), bersumber pada filsafat dasar tersebut. Penyusunan suatu pesan yang berupa rangkaian informasi yang dijabarkan dengan penalaran tertentu, dimulai dengan pengelolaan sumber informasi itu adalah koleksi.

Maka setiap petugas kuratorial, dari pelaksana hingga pengelola, harus benar-benar memahami bahwa pengelolaan koleksi mempunyai dua segi. Segi pertama adalah segi administrasi benda koleksi sebagai milik museum, di dalamnya termasuk pengelolaan pelestariannya. Segi kedua adalah pengelolaannya sebagai sumber informasi.

Pengelolaan sumber informasi memerlukan penanganan disiplin ilmu tertentu. Namun, ini tidak harus berarti bahwa yang diutamakan adalah pengembangan si kurator semata-mata tanpa memperhatikan filsafat dasar museum yang bersangkutan. Yang terjadi haruslah sebaliknya, pengetahuan kurator akan semakin dalam dengan menggarap pengumpulan data, untuk menyusun informasi yang sesuai dengan filsafat dasar museum dimana dia bekerja.

Komunikasi oleh museum selalu mempunyai tema tertentu. Tema itu merupakan penyebaran pesan. Akumulasi data yang berasal dari study koleksi merupakan bahan untuk menyusun berbagai pesan. Pesan yang bersumber pada filsafat dasar museum kemudian dijabarkan dalam tema. Dengan demikian dapat disusun formulasi komunikasi yang tepat dan dikendalikan oleh batasan-batasan yang jelas. Ia tidak sekedar berupa penampilan koleksi yang mengambang tanpa arah.

Syarat utama dalam penyusunan komunikasi adalah tersedianya data informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban itu adalah pemrosesan yang dilakukan berdasarkan kaedah serta cara kerja ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu yang menangani data informasi itu. Di sinilah dituntut kemampuan ilmiah para kurator. Dan yang juga amat penting adalah kejujuran ilmiahnya. Segi ini dalam pengelolaan koleksi sepenuhnya merupakan kerja ilmiah yang tunduk pada etika yang berlaku dalam dunia akademik. Inilah segi ilmiah pada setiap museum. Ia merupakan penjamin akan kebenaran informasi yang diberikan. Ia merupakan bobot dari setiap museum. Ia tidak tampil langsung pada pameran, tetapi ia merupakan pertanggungjawaban yang memberi warna khas pada penampilan museum.

Indikasi akan bobot kerja ilmiah pada suatu komunikasi museum tampil pada penerbitannya serta label yang menjelaskan pameran,

termasuk pilihan kata yang digunakan serta bentuk pisik label-label itu. Harus selalu diingat bahwa ketepatan informasi yang disajikan melalui suatu pameran memerlukan keterangan tertulis sebagai acuan. Oleh karena itu, informasi yang tertulis tidak boleh meragukan. Oleh karena pameran adalah suatu komunikasi maka penyusunan label harus mempunyai "target group" sebagai sasaran. Jelas bahwa label tidak disusun untuk orang museum itu sendiri.

V. Sinkronisasi dan Kerjasama

Sinkronisasi dan kerjasama yang dimaksud di sini adalah dengan berbagai media komunikasi dalam masyarakat, misalnya pers. Kegiatan komunikasi oleh museum dipandang dalam *scope macro* akan tampak sebagai bagian dari berbagai kegiatan komunikasi yang lain. Jika museum bertujuan untuk memajukan kecerdasan bangsa serta turut membina kebudayaan nasional dalam arti luas, maka sektor komunikasi yang dekat dengan dirinya, lebih jelas sebagai lembaga edukatif cultural yang bergerak dalam perpaduan antara seni dan ilmu. Oleh karena itu, museum tidak boleh awam mengenai perkembangan dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan. Ia harus sama akrabnya dengan kedua bidang tersebut.

Adapun kedua bidang itu juga mempunyai sektor serta media komunikasi. Ada majalah ilmiah, ada berbagai seminar serta pertemuan ilmiah yang lain, ada rubrik ilmu pengetahuan di media masa cetak dan elektronik.

Museum harus dapat memanfaatkan peluang-peluang tersebut di atas untuk menampilkan dirinya. Dengan demikian, ia hadir dan dapat menjadi komunikator yang efektif.

VI. Evaluasi

Mengingat bahwa setiap komunikasi oleh museum merupakan salah satu penjabaran dari filsafat dasar museum maka ia merupakan kegiatan museum itu sebagai suatu unit, bukan kegiatan salah satu bidang atau bagian dari museum itu.

Pembagian unit museum dalam bidang, bagian, atau seksi adalah untuk melaksanakan pengendalian administratif, sebagai unit produksi atau fungsional ia merupakan suatu kesatuan.

Dalam hubungan dengan hal tersebut di atas maka keberhasilan komunikasi, yang berarti penyebaran maupun penyediaan informasi, merupakan keberhasilan seluruh museum.

Perlu diingat kiranya bahwa yang penting pada suatu pameran adalah jumlah pengunjung yang melihat. Jelas bukan kemeriahan pembukaan atau peresmiannya. Sebagai suatu komunikasi, temporer ataupun permanen, yang harus diperhatikan ialah bagaimana menarik pengunjung sebanyak-banyaknya. Hal ini adalah salah satu tanggung jawab pimpinan setiap museum. Selain itu, pimpinan setiap museum harus menemukan berbagai cara yang dapat dipercaya untuk mengukur dampak informasi yang disediakannya pada peningkatan pengetahuan masyarakat umum.

VII. Penutup

Syarat-syarat untuk dapat melakukan fungsi museum sebagai sumber informasi seperti yang diuraikan di depan kiranya dapat ditambah dengan suatu persyaratan dalam bidang pengelolaan. Semua hal tersebut di atas, fase demi fase sebaiknya dipahami oleh seluruh karyawan museum. Walaupun dalam kenyataannya hanya sebagian yang langsung terlibat, namun yang berkomunikasi adalah seluruh museum sebagai unit.

Catatan : Naskah tulisan ini pernah dibawakan dalam ceramah di Museum Nasional Jakarta, tanggal 3 Nopember 1987.

MUSEUM YANG MEMIKAT PENGUNJUNG

Sebuah museum adalah sebuah tempat rekreasi yang edukatif. Sebagai suatu tempat rekreasi, museum harus mengembangkan daya pikat yang tinggi. Daya pikat ini erat hubungannya dengan sikap-sikap psikologis seseorang yang mendatangi suatu tempat untuk memperoleh rekreasi.

Seseorang yang datang untuk mendapatkan rekreasi di kebun binatang sudah membahayangkan bahwa ia akan melihat berbagai binatang yang menarik yang tidak setiap hari dapat dilihatnya. Dalam hubungan tersebut ia bukan hanya tertarik oleh rupa berbagai binatang itu, tetapi juga tertarik oleh tingkah lakunya.

Jika kebun binatang itu juga dapat menampilkan lingkungan yang menyenangkan maka keseluruhannya menghasilkan daya pikat yang akan mengundang pengunjungnya untuk kembali lagi. Dari kunjungan rekreatif ini lambat laun dapat tumbuh sikap-sikap positif yang pada akhirnya menunjang salah satu tujuan kebun binatang, yaitu untuk menggalakkan kesadaran masyarakat mengenai pelestarian alam, khususnya margasatwa yang merupakan bagian dari ekosistem manusia sendiri.

Sudahkah para pengelola museum kita berfikir ke arah yang sama? Ataukah masih terlalu terpukau kepada museum sebagai lembaga ilmiah yang hanya berkomunikasi dengan kalangan tertentu saja?
Apakah sebenarnya yang memikat perhatian seseorang yang berkunjung ke museum dengan tujuan rekreasi?

Untuk memperoleh sesuatu yang ingin dicapai oleh kebun binatang, diperlukan usaha yang lebih banyak dan bersungguh-sungguh dari fihak pengelola museum. Sebab pertama adalah nama museum untuk kebanyakan anggota masyarakat Indonesia tidak memberi gambaran yang jelas tentang

fungsinya, bahkan isinya. Nama itu tidak sejelas "kebun binatang". Oleh karena itu, pengelola museum harus selalu berusaha untuk menjelaskan apa sebenarnya museum itu, serta apa manfaatnya bagi masyarakat. Namun, para pengelola sendiri harus terlebih dahulu menghayati benar hakekat museum itu. Khususnya hakekat museum dalam perkembangannya yang modern sekarang ini. Jika mereka sendiri tidak menghayatinya, bagaimana mereka akan dapat menjelaskannya secara benar kepada masyarakat.

Dibanding dengan apa yang disajikan di kebun binatang, koleksi museum tidak dengan sendirinya akan memancarkan daya tarik seperti binatang hidup yang bergerak dan bertingkah laku. Oleh karena itu, pengelola museum harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mengandung daya tarik pada koleksinya itu. Dalam menemukan faktor tersebut berbagai hal harus dipertimbangkan. Selain itu, sikap orang museum sendiri amat penting. Sikap itu berawal dari kesadaran bahwa museum bertujuan melayani masyarakat. Jelas bukan untuk menyediakan suatu tempat untuk misalnya "melampiaskan" kecenderungan minat para kurator tanpa mempertimbangkan apakah hal itu bermanfaat bagi tujuan pengabdian kepada masyarakt.
Apalagi jika museum itu dibiayai oleh dana dari anggaran pemerintah, berarti dana masyarakat.

Museum juga harus mempertimbangkan bahwa yang menentukan apakah ia berhasil dalam pelayanan masyarakat adalah masyarakat sendiri. Hal itu akan nampak dari jumlah kunjungan yang didorong oleh minat, dan kehadirannya dalam minat masyarakat pada umumnya. Walaupun studi perbandingan dengan museum lain cukup penting, demikian pula pertukaran pendapat antara berbagai kalangan permuseuman, namun, jangan sampai pengelola museum terjebak mengatur museum untuk sesama orang museum. Hal ini telah disinyalir dalam beberapa literatur museum yang membahas masalah ini di berbagai museum di luar negeri. Di antaranya bahkan ada museum yang sudah mempunyai sejarah yang cukup lama.

Dalam literatur teknis museum cukup banyak petunjuk mengenai berbagai hal yang harus diperhatikan dalam penyusun tata pameran. Namun, harus diingat bahwa sebagian besar petunjuk itu didasarkan pada pengalaman dan hasil penelitian yang diperoleh di negara yang sudah maju

serta mempunyai latar belakang kebudayaan yang mungkin berbeda dengan kita. Sebagian besar dari petunjuk teknis itu tentu masih amat relevan. Dan selama kita belum mempunyai bahan dari hasil penelitian kita sendiri maka petunjuk teknis itu tidak boleh diabaikan. Namun, demi kesempurnaan konsep-konsep yang kita susun, perlu dilakukan berbagai penelitian yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat menjadi dasar pengembangan berbagai kebijaksanaan operasional permuseuman di Indonesia. Khususnya yang berhubungan dengan pelayanan museum kepada masyarakat, dan lebih khusus lagi, yang berhubungan dengan penciptaan daya tarik, baik melalui penyajian koleksi maupun program-program bimbingan.

Dr. P.H. Pott dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Museologi di Universitas Leiden, Negeri Belanda, menyatakan bahwa dalam pengembangan daya pikat museum bagi pengunjung perlu diperhatikan apa yang menjadi pengalaman masyarakat dalam kehidupan masa kininya. Apakah yang dapat menimbulkan minat dan rasa penghargaan terhadap koleksi museum pada pengunjung masa sekarang pada umumnya.

Setiap museum pada umumnya mempunyai cukup banyak benda koleksi berupa benda-benda masa lampau yang tidak berperanan lagi dalam kehidupan masyarakat masa kini. Bagi sekelompok kecil ahli, benda-benda itu dengan sendirinya menarik minat. Namun, museum tidak didirikan untuk para ahli semata-mata. Maka persoalan yang dihadapi para pengelola museum, khususnya di Indonesia, adalah membuat benda-benda koleksi yang disajikan bermakna bagi masyarakat pengunjung masa kini.

Dr. Pott juga menyatakan bahwa museum tidak lagi semata-mata menyajikan benda-benda, bagaimanapun indahnya benda itu. Ia telah berkembang ke arah suatu lembaga yang menyajikan berbagai subjek melalui penyajian koleksinya. Subjek-subjek demikian itu selalu mengandung segi permasalahan. Permasalahan itulah yang diharapkan menjadi rangsangan agar para pengunjung, atau sebagian dari pengunjung, memperoleh suatu pengalaman intelektual. Pengalaman ini diharap akan mendorong yang bersangkutan untuk mengembangkan minat terhadap hal-hal yang menjadi "mission" suatu museum.

Sebagai contoh dapat diajukan dalam tulisan ini fungsi museum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kebudayaan

nasional, tanpa mengabaikan peranan kebudayaan yang sudah kita kembangkan sejak dahulu, sebagai sumber inspirasi dan kearifan. Dalam konsep tersebut terkandung unsur masa depan dan unsur masa lampau. Bersama dengan itu tersirat pula bahwa masa lampau itu berlalu dengan cepat, bahkan semakin cepat. Hal ini menjadi masalah kita, bagaimana sebelum semua itu hilang sudah sempat kita catat dan pelajari secara lengkap. Kita tidak bermaksud menahan perjalanan waktu, tetapi ingin berusaha agar kita dapat mencatat sebanyak-banyaknya dari yang akan hilang bersama perjalanan itu.

Hal tersebut di atas adalah salah satu subjek yang dapat disajikan dasar konseptual untuk penyajian koleksi. Dasar tersebut harus diolah lebih lanjut. Ia merupakan semacam dasar filosofikal.

Dalam pengembangan dasar atau konsep tersebut di atas, kita dapat membahas kecenderungan sikap masyarakat kita pada umumnya terhadap hilangnya berbagai nilai budaya yang telah mapan serta kenyataan bahwa nilai-nilai itu belum diganti oleh nilai baru yang sama mantapnya. apakah kenyataan yang sedang terjadi itu disadari? Bagaimanakah sikap mereka yang menyadari apa yang sedang terjadi? Apakah sebagian besar masyarakat bersikap acuh tak acuh? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut dan pertanyaan lain mengenai hal yang sama akan menjadi dasar pengolahan penyajian koleksi yang kemungkinan dapat memikat masyarakat karena merangsangnya untuk berfikir.

Keaneka ragaman koleksi yang dimiliki suatu museum memungkinkannya untuk mengembangkan aneka subjek sebagai dasar konseptual berbagai jenis tata pamerannya maupun program-program bimbingannya. Sebagai tempat rekreasi yang edukatif, museum turut pula menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam menggunakan fasilitas umum. Suatu hal yang masih perlu kita perhatikan dengan baik. Banyak tempat-tempat umum yang dalam waktu singkat mengalami kemerosotan dalam penampilan karena antara lain para pemakai fasilitas tersebut kurang bertanggung jawab. Misalnya dalam menjaga kebersihan.

Museum sangat bertumpu pada penampilan sebagai salah satu daya pikatnya. Oleh karena itu, para pengelola museum berkewajiban untuk selalu menjaganya. Kebersihan dan kenyamanan ruang-ruang pameran akan sangat menunjang citra museum itu dan dengan sendirinya akan

memikat pengunjung. Sikap dan tingkah laku yang menunjang penampilan museum harus dimulai dari sikap para pengelolanya.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa keberhasilan museum untuk memikat pengunjung bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya tanpa usaha yang dimulai sejak perencanaan tata pamerannya. Penyusunan tata pameran bukan terutama untuk dipamerkan kepada para ahli permuseuman, tetapi untuk melayani masyarakat. Untuk dapat melakukannya dengan baik diperlukan dasar-dasar yang disusun berdasarkan penelitian mengenai berbagai aspek dari pameran sebagai media komunikasi museum. Dasar-dasar tata pameran bersumber pada "mission" dari museum.

Sebagai kesimpulan akhir, tidak berlebihan kiranya jikalau disampaikan bahwa penyajian koleksi museum dalam bentuk tata pameran memerlukan pengetahuan psikologi edukasi, selain hal-hal yang berhubungan dengan estetika dan teknik penyajian benda tiga dimensional. Bahkan, untuk menilai apakah suatu pameran berhasil diperlukan pula disiplin ilmu lainnya.

PERMUSEUMAN MENYONGSONG TINGGAL LANDAS

Catatan Redaksi

Naskah ini merupakan pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh Direktur Permuseuman dalam kesempatan pengarahan pada Rapat Kepala Museum Propinsi se Indonesia di Jakarta, tanggal 27 September 1988. Redaksi merasa perlu memuat dalam terbitan nomor ini, karena isinya relevan dan layak untuk diketahui secara luas oleh kalangan permuseuman di Indonesia.

Selengkapnya pokok-pokok pikiran tersebut sebagai berikut :

1. Kita akan segera memasuki PELITA V, yaitu Pelita terakhir dalam 25 tahun pembangunan berencana yang pertama.

2. Selama 25 tahun tersebut, pembangunan permuseuman telah berkembang dari pembangunan yang berupa rehabilitasi museum yang telah ada, menjadi pembangunan museum-museum propinsi baru. Selama 25 tahun akan selesai di bangun atau direhabilitasi 26 museum propinsi serta 3 museum khusus di Jakarta yang erat hubungannya dengan sejarah perjuangan kemerdekaan nasional kita, dan sebuah museum nasional.

3. Di samping museum-museum yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tersebut di atas, telah berdiri pula puluhan museum lain. Dan tak boleh dilupakan sejumlah museum di luar Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan yang telah berdiri sejak sebelum perang Dunia II. Sebagian dari museum-museum itu telah mempunyai nama dalam dunia ilmu pengetahuan internasional. Misalnya museum-museum Botani dan Zoologi di Bogor, serta museum Geologi di Bandung.

4. Uraian di atas mengisyaratkan kepada kita, bahwa sesungguhnya potensi permuseuman di Indonesia sudah hadir. Namun potensi itu masih perlu penggarapan secara berencana, berkesinambungan, dan dengan kesungguhan yang tinggi agar menjadi kenyataan seperti yang kita harapkan. Dalam hubungan dengan hal tersebut, maka PELITA V menjadi sangat menentukan jika permuseuman di Indonesia ingin tinggal landas bersama sektor-sektor lain. Khususnya bidang-bidang lain dalam sektor pendidikan dan kebudayaan, dan sektor-sektor lain yang terkait dengan pembangunan kebudayaan termasuk sektor pariwisata yang sangat bertumpu pada sektor kebudayaan.

5. Pada saat ini sudah tampil tantangan-tantangan yang merupakan gejala harapan pemerintah dan masyarakat terhadap permuseuman yang harus kita tanggapi sebagian bagian dari gambaran peranan permuseuman di hari depan. Tantangan pertama adalah dalam bidang security. Sudahkah dunia permuseuman mempunyai sikap yang tetap terhadap security museum khususnya lingkungan museum pendidikan dan kebudayaan. Walaupun pemerintah meningkatkan anggaran untuk biaya instalasi peralatan serta personil security, jika tidak terdapat kesadaran security pada para pengelola dan pelaksana di museum-museum, maka perhatian pemerintah tidak banyak artinya. Tantangan selanjutnya berupa tantangan terhadap peranan kultural edukatif serta rekreatif dari museum. Ini berarti fungsi museum dalam pengabdiannya untuk turut mencerdaskan bangsa serta penampilannya dalam jalur Pariwisata.

6. Tantangan-tantangan tersebut adalah tantangan yang harus segera dihadapi. Kita semua mengetahui bahwa untuk menghadapi tantangan-tantangan itu, pemerintah dalam tahun ini telah menyediakan anggaran belanja tambahan. Oleh karena itu kita tidak boleh menganggap ABT ini sebagai "rejeki nomplok" atau keberuntungan yang menyenangkan semata-mata. ABT itu menggambarkan harapan dan kepercayaan.

Dalam hubungan ini Direktorat akan mengadakan pengawasan yang ketat bersama dengan aparatur pengawasan yang ada. Nilai peranan permuseuman dalam masa-masa yang akan datang sebagai unit pelaksana pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan kita mengelola ABT itu.

Baik dari segi prosedur administratif maupun manajemen, harus kita sadari benar-benar bahwa ABT itu tidak diberikan secara merata kepada unit-unit lainnya. Permuseuman mendapat pengutamaan. Jangan sampai kita merusak hal itu.

7. Tantangan-tantangan yang berikut berasal dari organisasi permuseuman itu sendiri. Setelah empat Pelita kita melihat kenyataan bahwa kita belum mencapai tingkat profesionalisme yang kita perlukan secara merata. Kemampuan profesional masih cukup langka. Akibatnya penghayatan terhadap tugas masih belum mencapai tingkat yang menghasilkan dedikasi profesional yang mendorong seseorang untuk selalu menambah pengetahuannya dan menyempurnakan ketrampilannya.

   Dalam pada itu permuseuman kita sudah akan menghadapi alih generasi yang pertama. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi para pelopor pendirian permuseuman di Indonesia sudah akan meninggalkan medan baktinya.

8. Menghadapi kendala dari dalam organisasi permuseuman, Direktorat Permuseuman sejak beberapa tahun berusaha mengembangkan usaha meningkatkan kemampuan teknis untuk staf museum maupun direktorat. Juga dengan pihak-pihak luar negeri.

   Dalam 2 tahun terakhir ini, 11 orang staf sudah memperoleh pengalaman di luar negeri melalui latihan-latihan dan pendidikan. Ditambah dengan sekitar 30 orang yang mendapat pendidikan tambahan di dalam negeri. Jumlah tersebut masih sangat kurang. Kekurangan itu tidak semata-mata oleh kurangnya dana yang dapat disediakan, namun oleh kurangnya kemampuan calon untuk memenuhi persyaratan teknis. Lebih-lebih untuk pendidikan dan latihan di luar negeri. Amat sulit untuk memperoleh biaya dari pemerintah guna memberi kemampuan dasar bagi calon. Kalaupun tersedia dana hanyalah untuk penyempurnaan kemampuan saja.

9. Pertemuan yang kita selenggarakan hari ini adalah pertemuan para

"Top Executive" penyelenggara permuseuman di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu maka pertemuan ini diharapkan selanjutnya semakin berkembang menjadi pertemuan profesional yang top di Indonesia. Selain merupakan forum komunikasi kedinasan ia harus tumbuh menjadi forum untuk menyampaikan ide-ide akademik yang bersumber pada pengalaman profesional. Forum ini akan berkembang menjadi tolok ukur kemampuan profesional Top-excecutive permuseuman di Indonesia, khususnya yang bekerja di museum-museum Pendidikan dan Kebudayaan. Di masa yang akan datang dapat dikembangkan forum lain yang mengundang "museum profesionals" dari kalangan lain. Kita harus semakin menyadari bahwa sistem permuseuman bukanlah suatu sistem yang tertutup dipandang dari sudut akademik. Ia tidak berbeda dengan kalangan ilmu pengetahuan. Hanya dalam fungsi ia mempunyai sifat yang sebagian tertutup demi pelaksanaan tugas pelestariannya. Dalam hubungan ini perlu kita catat bahwa dalam PELITA IV museum-museum tertentu sudah akan mulai dikembangkan menjadi lembaga yang mempunyai corak akademik yang lebih jelas. Tentu ini merupakan tambahan tugas lagi dalam pengembangan personil.

10. Sebagai penutup saya ingin mengingatkan bahwa hasil-hasil pertemuan kita belum sempat kita kembangkan lebih lanjut, karena banyaknya tugas yang akhir-akhir ini harus ditangani oleh Direktorat permuseuman. Khususnya dalam penutupan masa REPELITA IV ini, antara lain dalam bentuk penyusunan laporan empat REPELITA pembangunan permuseuman yang diminta oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga keterlibatan sebagian staf Direktorat Permuseuman dalam persiapan pameran kebudayaan di Amerika Serikat tahun 1990–1991 yang akan datang.

    Hasil-hasil pertemuan yang lalu masih akan kita bahas lagi pada waktunya.

    Mengingat pertemuan kali ini terjadi pada akhir suatu REPELITA dan menghadapi REPELITA baru, maka sifat pembicaraan kita mengandung unsur yang strategis di samping usaha pemantapan pengaturan dan pelaksanaan yang bersifat teknis. Khususnya juga karena adanya UPT-UPT baru yang berbeda status dengan UPT yang lama.

    Diharapkan pula akan menjadi konsultasi teknis pada pertemuan ini.

SIKAP PENELITI SEBAGAI SALAH SATU SIKAP DASAR ORANG MUSEUM

I. Museum tanpa penelitian : Mungkinkah?

Dua abad yang lalu, di barat mulai terbentuk konsep modern dari museum. Pada tingkat awal perkembangannya konsep itu masih cukup berbeda dengan yang sekarang dianut di dunia modern. Namun suatu hal yang sudah ada sejak masa awal perkembangan itu adalah kaitannya yang erat dengan ilmu pengetahuan. Hal ini tidak mengherankan, karena ilmu pengetahuan merupakan salah satu pendorong adanya museum.

Sikap ingin tahu yang merupakan sikap dasar seorang ilmuwan menjadi semacam naluri budaya pada sebagian masyarakat di barat sejak berabad-abad yang lalu. Pengumpulan benda koleksi di berbagai tempat khusus yang kemudian berkembang menjadi museum, juga berawal dari naluri manusiawi yang suka pada benda-benda yang menarik dan mengumpulkannya sehingga terjadilah koleksi Sikap budaya yang cenderung ingin membuat analisis segera mendorong untuk museum menjadi lembaga yang berciri ilmiah.

Menjawab pertanyaan pada judul bab ini, maka kita dapat mengatakan: Tidak mungkin museum dapat berfungsi dengan baik tanpa melakukan penelitian.

II. Penelitian di Museum : Bagaimana itu?

Sesungguhnya ada berbagai sifat penelitian yang dilakukan orang atau lembaga. Misalnya penelitian dasar, penelitian tingkat lanjut, penelitian untuk dasar penyusunan kebijaksanaan, dan sebagainya.

Selain itu ada pula keterkaitan sifat penelitian dengan kedudukan serta perlu si peneliti. Seorang peneliti di Universitas harus membuktikan kemampuannya meneliti sebagai salah satu persyaratan dalam karier akademisnya. Untuk itu ia melakukan penelitian yang kemudian dinilai oleh dewan penilai. Salah satu contohnya adalah penulisan disertasi untuk memperoleh gelar doktor.

Penelitian di Universitas dalam rangka pelaksana dan tugas akademik seorang staf pengajar/peneliti sifatnya sangat perorangan. Ia secara pribadi bertanggung jawab atas semua pernyataan ilmiah yang dihasilkan oleh penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu iapun bebas memilih subyek penelitiannya. Hal ini berbeda dengan penelitian di museum. Penelitian yang dilakukan oleh staf penelitian museum selalu bersumber pada masalah yang berhubungan dengan koleksi yang dimiliki oleh museum yang bersangkutan. Selain itu, penelitian di museum merupakan karya bersama staf yang memperoleh pengarahan dari kepala Museum. Dengan status Fungsional Staf Kuratorial Museum, maka meneliti menjadi suatu keharusan, jika staf kuratorial ingin maju dalam karier.

Dapat disimpulkan bahwa para penelitian di museum harus mampu mengembangkan penelitiannya untuk menunjang fungsionalisasi museum. Harus disadari bahwa sifat penelitiannya tidak harus sama dengan penelitian pribadi yang dilakukan oleh seorang dosen peneliti. Namun tidak berarti bahwa penelitian oleh museum kurang penting. Perlu kita ingat bahwa teori **Kultur Kreise** lingkaran kebudayaan yang di masa lampau besar pengaruhnya dalam etnologi adalah hasil penelitian di museum.

III. Bagaimana Mengembangkan Penelitian di Museum

Kemampuan meneliti diawali dengan tumbuhnya sikap yang cenderung pada "academic curidusity", yaitu suatu sikap yang selalu merasa tergelitik oleh berbagai fenomena di dunia sekeliling kita. Keingintahuan itu tidak hanya terbatas pada bidang disiplin ilmu yang telah kita pelajari di perguruan tinggi. Lebih-lebih bagi staf peneliti museum umum. Namun harus disadari benar-benar bahwa setiap bidang memerlukan pendekatan disiplin ilmu yang khas. Minat kita pada berbagai bidang tidak dengan sendirinya berarti bahwa kita dapat

mengungkapkan masalah-masalah ilmiah dalam bidang ilmu yang bukan bidang kita, tanpa memahami metodologi serta teori ilmu yang bersangkutan. Artinya sebagai peneliti kita harus mempunyai minat dan pengetahuan yang seluas-luasnya, tetapi tetap mengutamakan pengembangan bidang pokok kita.

Selain penumbuhan sikap yang tepat pada para peneliti, tentu perlu dikembangkan lingkungan dan suasana yang menunjang. Harus ada suatu iklim yang sesuai.

Di lingkungan universitas hal itu terbina karena pembicaraan ilmiah dalam percakapan sehari-haripun sering muncul. Selain itu tersedia forum-forum pembahasan dan peningkatan kemampuan kerja ilmiah. Misalnya pembahasan mengenai teori atau metodologi baru dalam suatu cabang disiplin ilmu.

Dapat kita simpulkan bahwa penelitian di muesum dikembangkan melalui sikap para peneliti. Selain itu harus ada iklim dan suasana yang menunjang. Dan sekali lagi perlu ditegaskan, Museum tak mungkin berfungsi dengan baik tanpa penelitian.

IV. Adakah Penelitian Lain Selain Penelitian Koleksi?

Di muka sudah disinggung tentang penelitian untuk dasar penyusunan kebijaksanaan. Museum juga melakukan penelitian demikian, khususnya untuk menyusun kebijaksanaan mengenai peran museum di masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai pengunjung. Bahkan dengan melakukan studi bandingan di museum lain, termasuk dengan museum luar negeri.

Penelitian mengenai pengunjung lajimnya bukan merupakan bidang kurator koleksi. Yang bertanggung jawab adalah kurator bidang edukasi.

Penelitian penting yang juga perlu dilakukan adalah penelitian di bidang konvervasi dan sekuriti.

Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya merupakan penelitian dasar kebijaksanaan. Hasilnya akan dituangkan dalam kebijaksanaan manajemen, petunjuk pelaksanaan tugas serta petunjuk teknis. Berbeda dengan penelitian koleksi yang hasilnya disajikan kepada masyarakat.

V. Apakah Kesimpulan Kita ?

Kita dapat menyimpulkan:

1. Penelitian tidak dapat dipisahkan dari museum.
2. Staf kuratorial khususnya, dan staf museum pada umumnya harus memahami penelitian dan mengembangkan sikap yang menunjang pertumbuhan penelitian di museum.
3. Penelitian di museum tidak hanya yang bertaraf sederhana. Ia harus dapat berkembang sampai tingkat lanjut.
4. Struktur fungsional museum dapat menjadi dasar untuk membina iklim dan suasana yang menunjang penelitian.

BEBERAPA PERTIMBANGAN DALAM MASALAH PELESTARIAN DI INDONESIA

Penyajian ini tidak membahas masalah-masalah teknis arkeologi yang berhubungan dengan usaha pelestarian sesuatu peninggalan. Uraian berikut ini mengemukakan beberapa pangkal tolak berpikir yang terasa kurang mendapat tekanan dalam masalah usaha pelestarian di Indonesia.

Usaha pelestarian khususnya kegiatan pemugaran berbagai monumen kepurbakalaan, masih kurang disoroti dari segi prinsip kegiatan pelestarian pada umumnya secara tuntas. Yang dimaksudkan di sini bukan prinsip teknis pemugaran itu, tetapi prinsip dasar mengapa kita sebagai pewaris benda hasil budaya itu berkewajiban untuk melestarikannya yang pada umumnya belum sampai menyinggung intinya.

a. Prinsip Pelestarian

Pekerjaan arkeologi pada dasarnya dapat dibagi dalam dua segi. Yaitu penelitian masa lampau dan pelestarian. Penelitian masa lampau pada umumnya dihubungkan dengan kegiatan eskavasi, walaupun tidak selalu demikian. Pelestarian pada umumnya dihubungkan dengan usaha pemugaran. Dua segi arkeologi itu adalah dua sisi dari sekeping mata uang karena keduanya berakar pada ilmu arkeologi.

Usaha pelestarian peninggalan masa lampau sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh kegiatan arkeologi, Museum juga melakukan kegiatan pelestarian warisan budaya yang berupa benda kebudayaan. Selain itu pada saat ini sedang digalakkan pula pelestarian yang lain, yaitu pelestarian lingkungan.

Dalam uraian ini saya batasi pembahasannya pada pelestarian yang berhubungan dengan masa lampau untuk masa kini dan masa depan.

Hubungan kita dengan masa lampau adalah sesuatu yang mutlak. Kita tidak dilahirkan dalam kehampaan. Kita adalah hasil dan pewaris dari beribu tahun perkembangan biologis dan kultural. Demi kemantapan perkembangan kita ke masa depan, pengetahuan mengenai masa lampau sama pentingnya dengan pengetahuan mengenai lingkungan. Bahkan ada yang menandaskan bahwa kedua hal tersebut sangat penting demi "survival" kita. Jika kita melanjutkan penalaran pada jalur ini, maka pentingnya pengetahuan akan masa lampau untuk kelestarian kita sendiri memberi hak kepada masyarakat untuk memilikinya. Dan hak untuk mengetahui tentang masa lampau harus kita jaga agar tidak dibahayakan oleh tindakan apapun karena hal ini menyangkut kepentingan masyarakat (public interest and concern).

Jika kita berpegang pada prinsip tersebut di atas, maka semua kegiatan arkeologi baik yang berupa penelitian untuk mengungkapkan masa lampau maupun pelestarian, sepenuhnya adalah pengabdian pada masyarakat. Setiap individu yang bekerja dalam bidang arkeologi harus sepenuhnya menyadari bahwa dalam menjalankan kegiatan, mereka bukan hanya sekedar melaksanakan tugas fungsional suatu jawatan, atau membuktikan kemampuan ilmiahnya, tetapi melayani masyarakat untuk memperoleh haknya mengetahui masa lampau[1]. Khususnya di Indonesia, karena semua kegiatan dalam bidang arkeologi dibiayai oleh uang rakyat yang diperoleh melalui pemerintah.

Berbagai peraturan dan perundang-undangan yang melindungi obyek arkeologi dan berbagai bentuk warisan budaya yang lain dapat diartikan sebagai pencerminan usaha untuk menjamin agar masyarakat dapat memperoelh pengetahuan tentang masa lampau secara terus menerus.

---

1. Charles R. Mc Gimsey III, menyebut hak masyarakat itu sebagai suatu "Birthright"

b. Sasaran Pelestarian

Seorang ahli arkeologi dan pejabat dalam bidang arkeologi Amerika mengatakan "...... no. one owns exclusive rigths to an archaeological object or, even more important, to archaeological data ......". Ia berpendapat bahwa objek seni dan informasi ilmiah adalah bagian warisan (budaya) yang menjadi hak setiap orang.[2)]
Untuk kepentingan nasional, pendapat tersebut dapat kita sunting dengan menekankan kepentingan bangsa Indonesia terlebih dahulu.

Untuk menentukan sasaran pelestarian, pendapat ahli tersebut di atas patut kita pertimbangkan karena pada prinsipnya juga mencerminkan tujuan kita. Kalau tujuan pelestarian adalah untuk menjamin bahwa masyarakat, memperoleh pengetahuan mengenai masa lampau secara terus menerus dan setuntas-tuntasnya, maka yang sepatutnya menjadi sasaran pelestarian bukan hanya objek arkeologi yang berada di atas tanah atau di museum-museum, tetapi juga situs-situs arkeologi, baik yang telah diketahui dengan pasti maupun yang potensial. Situs adalah sumber objek arkeologi dan pada gilirannya objek-objek itu adalah sumber data.

Usaha pelestarian yang sedang dikembangkan secara internasional di bawah asuhan UNESCO bahkan telah diprogramkan pelestarian "historic towns, districts and villages". Telah digariskan bahwa pelestarian itu tidak akan menciptakan "museum complex" yang hanya menarik untuk wisatawan, tetapi akan menghidupkan kembali suatu unit sosial yang meliputi berbagai katagori penduduk dan memberikan rasa kepuasan yang mendalam, dan perasaan dalam kehidupan mereka sehari-hari akan adanya hubungan dengan masa lampau dan kebudayaannya.[3)]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran pelestarian adalah :

1. Melestarikan sumber data agar penelitian mengenai masa lampau dapat berjalan terus karena kita menyadari bahwa hal itu tidak akan tuntas dikerjakan hanya oleh satu generasi saja,

---

2. Charles R. Mc Gimsey III, Public Archaeology, Seminar Press

2. Melestarikan objek arkeologi agar dapat dilihat dan dinikmati oleh masyarakat luas yang tidak berminat untuk meneliti agar pada mereka juga tumbuh kesadaran akan masa lampau dan kehadiran dirinya di masa kini.

Semua ini disertai dengan penyajian informasi mengenai apa yang telah dapat diungkapkan.

Sasaran pelestarian menjadi dasar penyusunan kerangka pelaksanaan pelestarian. Dari kerangka itu dijabarkan persyaratan, prasarana dan sarana yang diperlukan, termasuk didalamnya jenis keahlian yang diperlukan dan harus diajarkan atau dilatihkan di lembaga-lembaga pendidikan arkeologi.

c. Pertimbangan dalam Pelaksanaan

Pelestarian suatu objek arkeologi apapun bentuknya, adalah sesuatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan arkeologi. Oleh karenanya prinsip-prinsip pelaksanaannya harus ditentukan oleh ahli arkeologi. Demikian pula pelaksanaannya harus melibatkan ahli arkeologi, lebih-lebih kalau sasaran pelestarian itu adalah untuk melestarikan sumber data. Karena sumber data arkeologi adalah masalah para ahli arkeologi, maka merekalah yang paling mengetahui atribut pada suatu objek arkeologi yang relevan untuk menghasilkan data. Semakin besar benda itu atau semakin kompleks susunannya, semakin diperlukan pula keahlian arkeologis.

Dalam pelaksanaan pelestarian dapat diperkirakan perlunya bantuan berbagai ahli bidang lain misalnya, pada pelestarian bangunan yang terdiri dari kegiatan pemugaran dan kegiatan lainnya. Dalam kegiatan demikian peranan arsitek amat penting. Walaupun demikian kata akhir sebaiknya ditentukan oleh ahli arkeologi. Tentu dapat timbul hambatan yang disebabkan pertimbangan teknis bangunan atau pertimbangan lainnya. Hal ini akan kami singgung dibagian lain kertas kerja ini.

Sebagai suatu kegiatan arkeologis maka pelaksanaan pelestarian objek arkeologis sedapat mungkin mempertimbangkan prinsip dan metode arkeologi, terlebih-lebih jika pelestarian itu dilakukan pada sebuah bangunan atau kelompok bangunan bersama lingkungannya.

Tidak mustahil bahwa lingkungan itu mengandung objek arkeologi yang mempunyai relevansi dalam mengungkapkan latar belakang bangunan yang dilestarikan.

Suatu ciri dari kegiatan arkeologi adalah perlunya kecermatan sehingga memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Hanya eskavasi penyelamatan (rescure excavation) dilakukan dalam waktu yang singkat karena tidak ada kemungkinan lain. Kegiatan pelestarian sebaiknya jangan dilaksanakan dengan pola eskavasi penyelamatan. Ia sebaiknya didahului oleh studi yang seksama dan bila perlu disertai dengan eskavasi percobaan (trial excavation, test pitts) agar usaha pelestarian itu benar-benar mencapai sasaran.

Penggunaan metode dan teknologi dari ilmu lain tentu dapat dibenarkan jika hal itu tidak merugikan prinsip arkeologi. Oleh karenanya jika ada metode ilmu lain yang telah diadaptasi dengan keperluan arkeologi dan telah terbukti hasilnya, maka metode ini lebih diutamakan.

d. Kemungkinan Hambatan dan Tantangan

Hambatan pertama dalam menangani pelestarian yang perlu dilaksanakan pada masa ini adalah kurangnya tenaga terdidik yang tersedia. Walaupun Proyek Pemugaran Borobudur telah menghasilkan tenaga yang berpengalaman, tetapi jumlahnya belum memadai. Khususnya tenaga pimpinan yang mempunyai latar belakang pendidikan arkeologi.

Hambatan selanjutnya adalah masih belum meluasnya pengertian di kalangan masyarakat tentang arti berbagai peninggalan arkeologi sebagai sumber data untuk mengungkapkan masa lampau bangsa kita. Padahal keberhasilan usaha pelestarian memerlukan dukungan masyarakat, baik dalam pelaksanaan maupun dalam usaha pengamanannya. Letak sebagian dari situs dan objek kepurbakalaan juga dapat menimbulkan hambatan. Banyak objek yang harus dilestarikan letaknya di lingkungan dekat pemukiman atau di tanah produktif yang berguna bagi hajat hidup masyarakat lingkungan tertentu. Keadaan demikian ini mengandung kemungkinan kesulitan yang bersifat sosial.

Sebaliknya objek-objek yang letaknya terpencil di daerah yang sulit dicapai karena keadaan perhubungannya, juga menghadapkan usaha pelestarian pada berbagai hambatan.

Hambatan tersebut tentu masih dapat bertambah dengan sejumlah hambatan lain yang sehari-hari dihadapi oleh mereka yang melaksanakan pelestarian. Hambatan-hambatan tersebut menghasilkan berbagai tantangan yang harus diselesaikan, di samping itu ada pula tantangan yang lebih mendasar dan merupakan sifat dari keadaan arkeologis Indonesia. Tantangan pertama adalah luasnya tanah air kita yang mempunyai kekayaan obyek arkeologi yang besar jumlahnya dan tersebar di semua penjuru kepulauan ini.
Selain penyebaran horizontal atau spasial dari objek-objek arkeologi, ada pula distribusi vertikal yang bersifat temporal yang menjangkau jarak waktu ratusan ribu tahun dan mewakili berbagai fase perkembangan kebudayaan bangsa kita.
Tantangan berikutnya adalah tantangan yang timbul karena kegiatan pembangunan yang sedang berjalan. Seperti juga diberbagai negara lain, pembangunan yang diharuskan oleh kebutuhan untuk peningkatan mutu dan taraf hidup masyarakat, menyebabkan timbulnya ancaman terhadap berbagai sumber data arkeologi. Di sini kita melihat suatu dilema. Baik pengetahuan tentang masa lampau maupun pembangunan adalah dua hal yang mutlak jika kita melakukan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

e. Beberapa Pertimbangan Untuk Mengatasi Hambatan dan Tantangan

Banyak hambatan dan besarnya tantangan yang dihadapi usaha pelestarian memerlukan suatu usaha yang terpadu untuk mengatasinya. Terpadu dalam arti merupakan usaha yang terjalin dalam suatu sistem yang melibatkan berbagai bidang diluar arkeologi. Keterpaduan itu harus tercermin dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Legislasi

   Untuk memberikan dasar yang kuat pada usaha pelestarian diperlukan peraturan berupa undang-undang atau bentuk peraturan yang lain yang dalam penyusunannya adalah tanggung jawab

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dengan pertimbangan dari berbagai instansi lain. Walaupun pada saat ini sudah ada berbagai peraturan yang mengatur masalah arkeologi, tetapi sudah sejak lama dirasakan bahwa yang ada sekarang ini tidak memadai lagi. Dan jika ada suatu undang-undang yang disusun untuk melindungi sumber data pengetahuan mengenai masa lampau sebaiknya hal itu tidak hanya dikenakan pada objek arkeologi saja, tetapi juga hal-hal lain yang relevan. Misalnya lingkungan alamiah yang pada masa lampau merupakan pentas perkembangan manusia dan kebudayaannya, baik itu lingkungan biotik maupun abiotik. Juga warisan budaya yang tidak dapat digolongkan ke dalam objek arkeologi misalnya etnografika dan historika.

2. Kebijakan (policy)

Kebijakan yang terpadu dan menyeluruh diperlukan sebagai penjabaran undang-undang atau peraturan dalam bentuk pengarahan. Kebijakan ini memberikan pengarahan bagi instansi yang melaksanakan pelestarian maupun yang memanfaatkan hasil pelestarian. Pengarahan itu akan menjadi dasar berbagai program, bagi instansi maupun masyarakat, memberi pegangan dalam bersikap terhadap usaha maupun masyarakat, memberi pegangan dalam bersikap terhadap usaha maupun hasil pelestarian.

3. Organisasi

Yang dimaksud dengan organisasi yang terpadu tidak harus berujud suatu badan, tetapi lebih merupakan suatu tatakerja. Dengan demikian maka usaha pelestarian akan menjadi pertimbangan sektor-sektor lain dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Dalam jangkauan yang lebih jauh, mungkin hal ini yang dapat menimbulkan partisipasi masyarakat dalam usaha pelestarian.

4. Pendidikan

Dalam usaha mendidik tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pelestarian objek arkeologi, sudah ada kerja sama yang baik antara instansi pelaksana kegiatan arkeologi dengan lembaga pendidikan tinggi. Tetapi kegiatan ini sesungguhnya belum dapat disebut terpadu, karena lembaga pendidikan tinggi

sifatnya sepenuhnya berorientasi pada segi akademis. pada hal usaha pelestarian memerlukan berbagai jenis tenaga terdidik dan terampil yang tidak semuanya harus berkualifikasi akademis. Sampai saat ini belum tersedia kemungkinan yang mantap untuk mendidik tenaga menengah teknis. Usaha untuk menyediakan tenaga tersebut melalui berbagai penataran atau latihan jangka pendek tidak dapat memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli menengah teknis.

Dalam kegiatan pendidikan ini termasuk juga pendidikan masyarakat atau yang sekarang lajim disebut Binmas. Agaknya perlu diusahakan suatu "campaign" yang teratur, berkesinambungan dan terarah untuk menanamkan kesadaran mengenai pelestarian objek peninggalan dalam masyarakat. Usaha demikian tentunya akan lebih baik lagi jika tidak hanya dilakukan oleh instansi pemerintah, tetapi lambat laun juga oleh kelompok dalam masyarakat yang telah mengalami pembinaan yang cukup mantap.

Pertimbangan-pertimbangan yang diajukan disini didasarkan pada pengamatan usaha pelestarian yang dilakukan diberbagai negara yang telah mantap pengaturannya, termasuk diantaranya negara yang jauh lebih sedikit dan sederhana warisan benda budayanya jika dibandingkan dengan yang kita miliki.

f. Penutup

Pemugaran sebagai salah satu bagian dari pelestarian, dalam ukuran besar yang ditangani oleh bangsa Indonesia adalah Pemugaran Candi Borobudur. Usaha ini besar dalam ukuran volume pekerjaan, maupun dalam arti nilai budaya. Tidak mengherankan bahwa hal tersebut menarik perhatian seluruh dunia. Namun demikian jika kita perhatikan sasaran utama perhatian tidak mencakup suatu bagian kegiatan yang sesungguhnya amat penting karena ia merupakan salah satu ciri khas dari usaha pelestarian yang bertujuan melestarikan suatu sumber data, walaupun saya tidak mengetahui apakah hal ini juga menjadi pertimbangan dalam menyusun bagian yang dimaksud yakni bagian dokumentasi.

Di atas telah saya singgung kemungkinan terjadinya pertentangan antara kepentingan arkeologis dan kepentingan teknis pemugaran yang

bersifat arsitektural. Dalam keadaan demikian, pelestarian bangunan ada kemungkinan bahwa pertimbangan teknis pemugaran akhirnya menentukan arah pelaksanaan pada bagian tertentu. Dari segi arkeologi bangunan tersebut tidak lagi merupakan sumber daya masa lampau yang murni. Agar para peneliti objek tersebut dikemudian hari tidak terkecoh dan menganggapnya sebagai benda kreasi masa lampau, maka perlu ada pertanggungjawaban dokumenter dari kegiatan pemugaran yang berlangsung. Dokumentasi itu harus dapat memberi gambaran sejelas-jelasnya mengenai proses pemugaran; bukan hanya dengan gambar-gambar teknis, tetapi juga dengan uraian verbal yang jelas dan merupakan pertanggungjawaban atas semua keputusan yang telah diambil dalam proses itu. Khususnya keputusan yang mempunyai akibat pada nilai bangunan atau objek itu sebagai sumber data.

Dalam hubungannya dengan uraian di atas ini, maka setiap usaha pelestarian harus memberikan tempat yang penting pada bagian dokumentasi. Jangan hendaknya bagian ini hanya dipandang sebagai "filing cabinet", sebab hal ini merupakan penghubung bagi peneliti di masa yang akan datang antara keadaan objek sebelum dipugar dan sesudahnya. Selain itu juga akan mengungkapkan kadar kemampuan si pemugar.

Usaha pemugaran atau pelestarian di Indonesia sudah dilakukan oleh para ahli Belanda sejak awal abad ini. Walau bagaimana baiknya usaha ini seyogyanya kita melakukan penilaian kembali terhadap prinsip-prinsip pemugaran yang dianut pada masa itu untuk mengkaji apakah prinsip-prinsip itu masih dapat dipergunakan dalam hubungannya dengan tuntutan perkembangan ilmu arkeologi sekarang ini.

Sudah disinggung di depan bahwa kegiatan membangun dalam era pembangunan ini dapat membawa kemungkinan yang kurang menguntungkan untuk kelestarian objek-objek arkeologi. Oleh karenanya dalam rangka perpaduan instansi-instansi yang berkepentingan dengan pelestarian objek arkeologi sebaiknya secara teratur memonitor berbagai rencana pembangunan di seluruh Indonesia agar tidak tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan akan hilangnya suatu objek arkeologi. Walaupun mungkin objek tersebut tidak dapat dicegah "penggusurannya", tetapi jika telah diketahui sebelumnya dalam waktu yang cukup lama, maka

masih dapat direncanakan dengan tenang, tindakan apa yang harus dilakukan untuk dapat menyelamatkan objek tersebut sebanyak mungkin.

Untuk menciptakan keterpaduan dalam usaha pelestarian, apakah tidak perlu dikembangkan suatu pusat konservasi nasional yang tidak hanya menangani pengembangan "ilmu pelestarian" benda arkeologis, tetapi juga menangani benda-benda warisan budaya lainnya, misalnya koleksi di berbagai museum. Dengan warisan budaya yang demikian besar jumlahnya dan aneka ragam bendanya, sepantasnyalah kita mengembangkan "the science of conservation" sampai taraf yang setinggi-tingginya. Yang penting adalah membuat bidang ini cukup menarik sebagai lapangan kerja untuk para sarjana ilmu-ilmu alamiah. Mungkin perkenalan dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi dapat menggelitik "scientific curiousity" dan cultural reponsibility" mereka.

BELAJAR DARI PAMERAN KEBUDAYAAN DI AMERIKA SERIKAT (KIAS)

I. Pengantar

Tujuan Pameran Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat adalah agar dunia internasional lebih mengenal kebudayaan Indonesia melalui suatu kegiatan yang merupakan perwujudan dari Diplomasi Kebudayaan. Kegiatan tersebut dirasakan perlu karena dalam kenyataan Indonesia belum dikenal luas di dunia internasional.

Dalam positif yang diperkirakan akan timbul sebagai akibat Pameran KIAS ialah tumbuhnya minat yang lebih besar di berbagai bidang yang akan mendukung usaha pembangunan kita. Misalnya penanaman modal, ekspor non-migas, pariwisata, dan lain-lain.

Program kegiatan Pameran KIAS terdiri dari :

1. Pameran Inti
2. Pementasan dan Pergelaran Kesenian
3. Acara-acara Tambahan

Selain itu ada pula Acara Komersial seperti Promosi Pariwisata, Peragaan busana, Promosi Makanan dan Masakan, Pameran Barang Hasil Kerajinan, serta Promosi Toko-toko Serba Ada.

Dalam uraian ini akan kita khususkan perhatian pada Pameran Inti. Dan lebih khusus lagi bagaimana museum-museum Amerika yang menyertai Pameran Inti menyelenggarakan pameran mereka.

2. Pameran Inti KIAS

Pameran INTI KIAS terdiri dari : PEMERAN SENI KLASIK yang dipergelarkan di National Gallery of Art, Washington DC, Metropolitan Museum of Art, New York, Houston. Museum of art, Houston dan Asian Art Museum, San Francisco. Pameran Inti yang lain adalah Pameran Seni Tradisional yang dipergelarkan di Museum of Natural History, Washington DC, Museum of Natural Science, Houston, dan M.H. de Young Memorial Museum, San Francisco. Pameran yang ketiga adalah Pameran Seni Kraton yang diselenggarakan di Arthur M. Sackler Gallerry dari Smithsonian Institution, Washington DC, Asia Society Gallery, New York, dan History Museum of Los Angeles County, Los Angeles.

Ketiga jenis pameran yang termasuk pameran Inti dikelola oleh tiga orang kurator yang sudah sangat mengenal Indonesia melalui bidang masing-masing. Kurator Pameran Seni Klasik adalah Dr. Jan Fountein yang telah berpengalaman menyelenggarakan pameran yang hampir serupa di beberapa tempat di Amerika Serikat pada tahun 70-an. Kepakarannya dalam bidang seni klasik Indonesia tampil dalam beberapa karangannya. Perlu dicatat bahwa Dr. Fountein adalah juga pakar mengenai kebudayaan Jepang, selain itu sebagai mantan direktur Boston Museum of Art ia sangat berpengalaman pula dalam mengelola sebuah museum yang terkenal di seluruh dunia.

Kurator Pameran Seni Tradisional adalah Dr. Paul Taylor. Ia adalah seorang pakar antropologi yang menulis disertasinya mengenai kebudayaan setempat di Maluku. Untuk mengerjakan hal itu ia telah tinggal beberapa tahun di Indonesia, khususnya di Maluku Kemahirannya berbahasa Melayu Maluku sungguh mengagumkan. Bahkan ia lebih lancar berbahasa Melayu Maluku dari pada berbahasa Indonesia baku.

Kurator Pameran Seni Kraton adalah Dr. Helen Jessup. Walaupun kepakaran wanita sarjana ini mengenai arsitektur seperti terbukti dari disertasinya, namun ia juga mengembangkan Pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai kesenian Indonesia khususnya dan kebudayaan Indonesia pada umumnya.

Ketiga kurator tersebut di atas yang sudah memiliki pengetahuan mendalam mengenai Indonesia, masih melakukan studi khusus dalam mempersiapkan pameran mereka masing-masing. Studi khusus itu rata-rata memakan waktu tiga tahun.

Selain melakukan studi kepustakaan di berbagai perpustakaan di Indonesia maupun di luar negeri, mereka juga melakukan studi lapangan di Indonesia. Baru kemudian mereka melakukan pemilihan koleksi yang akan dipamerkan dalam Pameran Inti.

Tingkat pendalaman materi oleh para kurator dapat kita pesan dari daftar kepustakaan katalog tiap pameran tersebut. Daftar kepustakaan itu rata-rata memuat 200 sampai 300 judul. Banyak di antaranya terbitan baru, baik yang ditulis oleh pakar bukan Indonesia maupun oleh pakar Indonesia. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa mereka berusaha untuk memperoleh pemahaman yang seimbang mengenai apa yang akan mereka tampilkan dalam pameran.

Uraian di atas menunjukkan bahwa dasar penggarapan ketiga pameran dalam Pameran Inti adalah suatu kerja yang sepenuhnya berupa penelitian akademik. Hasilnya dapat kita baca dalam katalog. Tiap katalog rata-rata terdiri dari 300 halaman.

Selain mendalami sumber kepustakaan, para kurator juga mengembangkan pemahaman mereka mengenai subjek yang akan mereka tampilkan dalam pameran dengan menghubungi berbagai tokoh, pakar, budayawan, pengrajin, dan orang-orang lain yang mereka anggap dapat memberi keterangan yang mereka perlukan. Nama-nama mereka tampil dalam kata pengantar katalog. Jumlahnya beberapa puluh.

Setiap pameran dalam Pameran Inti mempunyai tema yang telah dirumuskan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari aspek tertentu dalam kebudayaan Indonesia. Kesimpulan yang dikembangkan menjadi tema juga mencerminkan pemahaman para kurator tentang Kebudayaan Indonesia.

Pameran Seni Klasik ingin menampilkan adanya kontinuitas dalam kesenian Indonesia sejak masa prasejarah. Khususnya dalam seni rupa. Bentuk seni rupa Hindu Budha Indonesia di masa lalu hanya

dapat difahami dengan menelusuri akarnya sampai ke zaman prasejarah. Pameran Seni Tradisional menampilkan akar seni klasik yang masih tersimpan dalam seni tradisional. Khususnya yang masih berkembang di berbagai daerah di luar Jawa. Pameran seni Kraton mengandung tema yang menjelaskan bagaimana kraton sebagai pusat kekuasaan di masa lampau berpengaruh dalam perkembangan seni rupa dan seni krya. Berbagai lambang tampil dalam rancangan serta pola seni rupa dan seni kriya yang mempunyai kaitan dengan kedudukan raja, serta hal-hal yang mempunyai sifat "diraja" atau "royal" dalam bahasa Inggris. Misalnya pola parang rusak barong pada kain batik yang hanya boleh menghias kain yang khusus dikenakan golongan bangsawan tinggi tertentu di Jawa. Contoh lain adalah pola hias dengan makhluk mitologi tertentu yang selalu muncul pada pola hias benda-benda yang digunakan upacara kerajaan.

Tema-tema tersebut tidak hanya ditampilkan melalui benda koleksi, tetapi juga ditunjang oleh sajian foto, film, bahkan penampilan seni pentas. Tujuannya adalah untuk memberi kesan yang lebih menyeluruh kepada pengunjung pameran.

Untuk dapat menampilkan tema pameran secara utuh dalam tata pameran, para kurator melakukan penelitian yang tidak hanya bertujuan untuk memperoleh data tentang benda koleksi yang akan dipamerkan, tetapi bertujuan untuk memperoleh data yang juga dapat menjelaskan latar belakang kebudayaannya dan latar belakang sejarahnya.

Lengkapnya penyusunan alur kisah serta data mengenai koleksi yang bersangkutan sangat besar pengaruhnya pada keberhasilan perancangan serta penyusunan pameran. Di dalamnya termasuk pula rancangan berbagai kegiatan yang mendukung pameran.

3. Aspek teknis

Dalam bab terdahulu telah dipaparkan secara umum kegiatan yang telah dikerjakan oleh para kurator Pameran Inti dalam mempersiapkan pameran mereka masing-masing. Masih ada aspek-aspek teknis dan administratif yang harus diperhatikan pula. Untuk ini para kurator juga mempunyai tanggung jawabnya yang tidak kecil.

Pameran inti KIAS merupakan pameran dari berbagai koleksi benda seni budaya Indonesia yang dimiliki oleh berbagai museum di Indonesia maupun di Eropa dan Amerika Serikat. Selain itu terdapat pula benda yang berasal dari koleksi pribadi, baik dari Indonesia maupun luar negeri. Untuk memperoleh izin memamerkan benda-benda tersebut diperlukan serangkaian usaha yang sering menyerupai kegiatan diplomasi. Selain itu harus diperhatikan aspek hukum yang terkait. Misalnya tentang kepastian hak milik, pengamanan terhadap penyitaan karena sesuatu perkara yang menyangkut pemilik, syarat-syarat peminjaman, dan akhirnya masalah asuransi.

Para kurator Pameran Inti selalu berhubungan dengan para penasehat hukum di lembaga masing-masing dalam menyusun berbagai perjanjian yang diperlukan. Demikian pula fihak Panitia KIAS serta Pemerintah Indonesia sebagai fihak yang menjaga kepentingan pemilik benda koleksi di Indonesia.

Aspek teknis lain yang masih perlu mendapat perhatian lebih banyak di Indonesia adalah pengambilan, transportasi, serta penyampaian koleksi yang dipinjam. Seluruh proses ini ditangani dengan cara yang amat cermat dengan acuan pasal-pasal dalam perjanjian, dalam ketentuan asuransi, serta ketentuan teknis permuseuman yang berlaku bagi cara-cara menangani benda koleksi. Salah satu contoh adalah harus dibuatnya apa yang disebut condition report. Condition report adalah sebuah laporan sangat rinci yang dibuat sebelum benda koleksi dimasukkan dalam wadah yang akan mengamankannya selama dalam pengangkutan. Laporan serupa akan dibuat lagi pada saat benda koleksi itu dikeluarkan dari wadahnya setelah sampai ditujuan. Hal tersebut selalu dilakukan setiap kali benda koleksi dipindahkan ke tempat pameran yang lain. Laporan ini dibuat sedemikian cermatnya sehingga berlian pada salah satu benda koleksi Pameran Seni kraton yang berjumlah ratusan dan sangat kecil ukurannya, selalu harus dipastikan bahwa jumlahnya tidak berkurang dengan menghitungnya setiap kali menyusun condition report.

Masalah lain yang mendapat perhatian khusus dan sangat cermat adalah pengepakan. Acuan pokoknya sama dengan yang mengatur pengamanan benda koleksi melalui condition report serta tindakan lain

yang diatur dalam perjanjian. Pengepakan harus dapat mengamankan benda koleksi dari kerusakan yang bersifat fisik maupun terhadap kemungkinan pencurian. Untuk itu antara lain digunakan sekrup-sekrup khusus, serta kunci khusus yang hanya dapat dibuka dengan peralatan khusus pula yang disimpan oleh petugas yang ditunjuk. Pada bagian dalam wadah benda koleksi terdapat suatu lapisan yang terbuat dari bahan khas untuk melindungi koleksi.

Misalnya dapat merendam benturan dan tidak mengandung unsur kimia yang dapat mempengaruhi kondisi benda koleksi.

4. Aspek Organisasi

Kegiatan Pameran Inti KIAS dikendalikan langsung oelh Panitia Pelaksana Pameran Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat, atau yang lajim disebut Panitia Pelaksana KIAS. Panitia ini mempunyai berbagai bagian atau unsur yang mengendalikan kegiatan seluruh KIAS. Di Amerika Serikat terdapat pula Panitia KIAS yang menjadi mitra kerja. Seperti diketahui seluruh kegiatan KIAS, baik yang di Indonesia maupun yang di Amerika Serikat sebagian besar dibiayai oleh dana yang dikumpulkan dari sumber swasta.

Sejak kegiatan persiapan hingga taraf pelaksanaan seluruhnya dikerjakan secara koordinasi antara Panitia Pelaksanaan di Indonesia dan Panitia KIAS di Amerika Serikat. Para kurator Pameran Inti telah mulai kegiatannya di Indonesia sejak tiga tahun sebelum pelaksanaan pameran.

Para kurator Pameran Inti mendapat kerjasama dari suatu tim yang disebut Tim Mitra Kerja. Tim ini terdiri dari para pakar Indonesia dalam bidang-bidang yang terkait dengan Pameran Inti. Mereka berasal dari kalangan museum, perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta budayawan.

Kegiatan persiapan maupun pelaksanaan Pameran Inti diperlancar oleh suatu Program Pelatihan Tenaga Teknis Museum. Program ini mengirim sejumlah tenaga teknis permuseuman Indonesia yang telah diseleksi untuk memperoleh pengalaman dengan "magang" di berbagai museum di Amerika Serikat. Misalnya bengkel kerja, simposium dan sebagainya. Salah satu persyaratannya adalah kemampuan yang cukup

dalam menggunakan bahasa Inggris, serta pengalaman bekerja di museum.

Peserta program beberapa kali berada di Amerika Serikat. Setiap kali untuk kurang lebih tiga bulan. Kecuali seorang yang tinggal lebih lama karena diizinkan mengikuti program latihan konservasi di Universitas New York. Kesempatan ini diberikan atas dasar penilaian fihak pengelola program di Amerika Serikat.

5. Yang baik dan berguna

Pameran Inti KIAS yang sebagian besar terdiri dari pameran benda budaya Indonesia yang diselenggarakan oleh berbagai museum besar dan penting, serta balai seni rupa yang termasuk kelas utama memberi pula pengalaman yang sangat berharga bagi para pengelola museum di Indonesia yang terkait. Selain pengalaman teknis yang belum pernah diperoleh pada tingkat seperti itu, yang juga tidak kalah penting adalah melihat dan mengalami suasana dan cara kerja yang terdapat di suatu museum di negara maju. Pengalaman itu diperoleh baik dalam kerja di Amerika Serikat, maupun dalam mereka menangani berbagai aspek pekerjaan kuratorial selama "mengolah" koleksi sebelum dikirim ke Amerika Serikat.

Para kurator Amerika yang mengelola Pemeran Inti adalah pakar dalam berbagai segi kebudayaan Indoensia. Koleksi yang mereka pilih untuk disertakan dalam pameran yang mereka asuh kebanyakan sudah lama mereka kenal. Dapat dikatakan mereka sudah akrab dengan benda-benda tersebut. Dalam memilih benda koleksi untuk dipamerkan di Amerika Serikat mereka berpedoman pada beberapa hal. Pertama pada keunikan benda serta kemampuannya untuk menunjang tema pameran yang telah mereka rancang. Kemudian mereka juga mempertimbangkan segi estetik dan daya tarik benda yang bersangkutan.

Para kurator sangat mempertimbangkan selera pengunjung museum Amerika yang telah biasa dimanjakan oleh berbagai pameran yang bermutu. Baik dari segi tata pameran maupun dari jenis benda koleksi yang dipamerkan. Sebelum Pameran Inti KIAS dipergelarkan, masyarakat Amerika baru mendapat suguhan pameran Khasanah

Sultan Sulaiman dari Turki yang terdiri dari perhiasan berbagai logam mulia dan berhiaskan ratna batu manikam bergaya Timur Tengah yang masyur itu. Bagaimanapun, masyarakat negara maju yang sudah mempunyai apresiasi terhadap museum sudah terbiasa dengan pameran museum yang berselera tinggi. Pertanyaan yang menggoda pada kurator adalah : Dapatkah mereka menampilkan koleksi benda budaya Indonesia ini dengan daya tarik yang tidak kalah dengan pameran lain yang pernah dipergelarkan sebelumnya.

Masalah yang menjadi perhatian para kurator Pameran Inti tersebut di atas menunjukkan beban tanggung jawab yang mereka sandang. Harus kita ingat bahwa penyandang dana pameran menuntut mutu pameran yang sesuai dengan sumbangan dana yang mereka berikan. Yang penting lagi, para kurator sebagai profesional harus menjaga mutu hasil kerja mereka. Kita melihat ada unsur kompetisi dalam menjaga mutu. Masing-masing tidak akan bekerja asal jadi.

Sekarang kita sudah mengetahui bahwa Pameran Inti Kias telah mencapai sukses besar. Pameran itu (bukan koleksinya) telah menjadi incaran beberapa negara. Kita juga mengetahui bahwa Pameran Inti kemudian dilanjutkan ke Negeri Belanda. Perlu kita catat bahwa yang dilanjutkan adalah seluruh pameran, jadi bukan hanya memindahkan koleksi. Semua itu terjadi berkat keberhasilan para kurator merancang dan menyajikan pameran.

Sebenarnya bentuk pameran selalu berubah disesuaikan dengan bentuk serta dimensi ruang pamer yang tersedia. Namun pameran tersebut tidak pernah kehilangan maknanya dan tetap mencerminkan gagasan para kuratornya. Pesan yang ingin disampaikan tetap utuh bagaimanapun bentuk tata pamerannya. Semua disebabkan karena mantapnya konsep yang menjadi dasar rancangan pameran itu.

6. Kesimpulan

Kita sudah sering mendengar alasan usang yang berhubungan dengan dana yang kurang dalam berbagai kegiatan. Memang tidak dapat diingkari bahwa biaya yang tersedia bagi pameran di Amerika Serikat itu besar. Baik dalam ukuran Indonesia maupun dalam ukuran Amerika. Namun tersedianya dana yang cukup tidak dengan sendirinya

menjamin keberhasilan pameran. Perlu ada tatakerja yang jelas pada setiap tahap pekerjaan. Selain itu juga tersedia tenaga profesional untuk menggarapnya. Mereka adalah orang-orang yang sangat mengutamakan mutu kerja yang dihasilkan. Sebagai profesional mereka harus menjaga reputasi. Kadang-kadang mereka bekerja sampai melampaui tuntutan kontrak, karena tidak ingin menghasilkan kerja yang di bawah standar mutu profesi mereka. Demikian yang dapat kita lihat pada cara kerja para kurator yang bertanggung jawab atas Pameran Inti KIAS.

Para kurator mendapat imbalan yang sesuai dengan karya yang dihasilkan menurut standar yang berlaku di Amerika Serikat. Demikian pula para perancang pamerannya. Mereka adalah perancang khusus untuk pameran di museum yang sudah mempunyai nama di kalangan museum-museum besar. Demikian pula para juru potret yang menghasilkan foto penunjang tata pameran, maupun yang dipergunakan dalam katalog. Hak cipta mereka dijamin dalam kontrak sehingga orang lain tidak dapat mempergunakan hasil karya mereka tanpa izin khusus dari para pemotret tersebut. Di sini kita melihat bagaimana "intelectual property" dilindungi sehingga para profesional tidak khawatir kalau-kalau karya cipta mereka dibajak orang. Keadaan seperti ini ikut pula mendorong prestasi para profesional, selain apresiasi masyarakat terhadap mutu karya yang memang sudah mapan.

Mereka yang menyertai persiapan Pameran Inti KIAS di Indonesia dapat menyaksikan betapa para kurator, baik Indoensia maupun asing bekerja keras. Para kurator asing sering pula harus bekerja dalam kondisi lingkungan yang berbeda dengan yang telah mereka kenal. Namun hal ini tidak terlalu menghalangi penyelesaian rencana kerja mereka. Malahan telah tumbuh rasa kesejawatan yang akrab antara para kurator Indonesia dengan mereka. Para kurator Indonesia yang masih perlu menimba pengalaman lebih banyak mendapat kesempatan sepenuhnya dari kerjasama itu.

Pameran Inti KIAS memberikan kesempatan kepada sebagian tenaga permuseuman Indonesia untuk melihat dan memahami etos kerja profesional di museum negara maju. Demikianlah harapan para sejawat yang tidak memperoleh kesempatan serupa. Kita semua

berharap agar pengalaman itu tidak dianggap sebagai suatu peristiwa yang berlalu semata. Mereka semua mempunyai kewajiban moril untuk meneruskan pengalaman itu kepada sejawat yang lain yang belum memperoleh pengalaman yang setaraf. Sikap menyimpan pengalaman yang bernilai profesional untuk kepentingan sendiri tentu bukan cita-cita program yang terkait dengan KIAS ini. Pengetahuan yang sudah diperoleh harus terus dikembangkan melalui penambahan pengetahuan maupun pengalaman, serta melalui aplikasi dalam kerjasama dengan sejawat di berbagai museum di Indonesia. Dengan demikian para peserta program pelatihan tenaga permuseuman dalam rangka KIAS dapat menjalankan peran yang diharapkan dari mereka, yaitu menjadi pelaku pengembangan profesionalisme di dunia museum di Indonesia.

Pembentukan seorang profesional tidak terjadi karena SK atau melalui jenjang kepangkatan. Seorang profesional tampil melalui mutu karyanya serta apresiasi masyarakat.

KIAS akan usai dalam waktu dekat. Namun pengalaman yang dapat kita petik daripadanya tidak boleh kurang dari dampak KIAS pada berbagai sektor dalam pembangunan nasional kita. Memang tidak banyak orang yang langsung terlibat dengan KIAS di kalangan museum di Indonesia. Namun pengalaman mereka jika didukung oleh rasa pengabdian yang besar dapat cukup berarti dalam usaha pengembangan dunia permuseuman Indonesia pada umumnya. Jika hal ini yang berlaku, maka keikutsertaan permuseuman Indonesia dalam KIAS memberi pengalaman yang sangat berharga. Selanjutnya terpulang kepada kalangan permuseuman Indonesia sendiri untuk mengembangkan pengalaman yang diperoleh menjadi bahan pelajaran untuk meningkatkan kemampuan teknis yang sudah dimiliki.

PERANAN "HIMPUNAN" DALAM PENINGKATAN FUNGSIONALISASI MUSEUM

Pendahuluan

Di Jakarta terdapat salah satu museum yang tertua di Indonesia. Museum itu adalah apa yang sekarang kita kenal sebagai Museum Nasional. Museum ini telah menempati gedungnya sejak tahun 1868. Sebelum menempati gedung tersebut. Museum Nasional telah menempati gedung-gedung yang lain. Di gedung itu pula semula terdapat perpustakaan yang koleksinya sekarang merupakan bagian terbesar dari koleksi Perpustakaan Nasional, bahkan termasuk pula koleksi naskahnya.

Di tempat itu pula di masa lalu terdapat suatu lembaga ilmiah yang amat bergengsi, yaitu Bataviaas Genootschap van Kunsten en Wetenschappen yang kemudian mendapat predikat Koninklijk, atau yang dalam bahasa Malaysia disebut Diraja. Suatu predikat yang menunjukkan bobot lembaga tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan Belanda khususnya, dan dunia pada umumnya. Lembaga ini adalah pemilik serta pengelola baik museum maupun perpustakaan tersebut di atas. Lembaga ilmiah ini didirikan pada tahun 1778 dan berhenti berfungsi pada tahun 1961. Pada saat itu telah bertukar nama Lembaga Kebudayaan Indonesia.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa di masa lampau di Jakarta telah ada sebuah lembaga ilmu pengetahuan yang kegiatannya telah membuatnya terkenal di kalangan serupa di dunia maju pada waktu itu. Bahkan di masa pendudukan Jepang kekayaan ilmiahnya tidak diganggu gugat, karena beberapa cendekiawan Jepang adalah anggota Lembaga tersebut sejak lama sebelum Perang Pasifik pecah.

Di museum itu dikembangkan kegiatan studi, penelitian, pelestarian, serta penyajian benda kekayaan budaya Indonesia, maupun benda-benda bukti sejarah. Mutu kegiatannya memenuhi standar akademik yang tinggi. Ilmuwan Indonesia yang berkarya di lingkungan tersebut antara lain Dr. Poerbatjaraka, Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat di samping pakar-pakar seperti Dr. Van Der Hoop, De Flines, dan jangan kita lupakan pula Prof. Damais, salah seorang pakar sejarah kuno Indonesia. Selain itu beberapa generasi sarjana ilmu budaya dan ilmu sosial, lebih-lebih yang belajar pada perguruan tinggi di Jakarta, telah menimba ilmu di perpustakaan yang ada di museum.

Tata pameran yang digelarkan pada masa lalu itu mungkin tidak sesuai dengan tata pameran modern masa kini dari segi estetika serta unsur teknik penataan yang lain. Namun ia didukung oleh suatu dasar ilmiah yang diperoleh melalui penelitian, serta administrasi koleksi berdasarkan suatu sistem tertentu. Administrasi tersebut selain merupakan unsur pengelolaan koleksi juga menyediakan sarana bagi para peneliti.

Para ilmuwan yang bekerja di lingkungan Bataviaas Genootschap mengelola berbagai penerbitan ilmiah, baik yang berupa berkala maupun monogrfi serta penerbitan yang lain yang penting bagi pengembangan ilmu kebudayaan dan ilmu sosial. Karangan-karangan itu tidak hanya berasal dari para pakar di lingkungan lembaga, tetapi juga berbagai karangan hasil observasi atau penelitian sumbangan berbagai kalangan. Banyak di antaranya karangan para pejabat pemerintah kolonial, khususnya pejabat pemerintah di daerah dan di antara mereka banyak lulusan Indologi Universitas Leiden. Studi tersebut membekali mereka dengan pengetahuan yang cukup mengenai bahasa-bahasa di Indonesia, serta sejarah kebudayaan dan etnologi. Bataviaas Genootschap juga menerbitkan berbagai karangan mengenai kepurbakalaan di Indonesia. Bagi seorang yang mempelajari sejarah kebudayaan serta etnografi Indonesia, terasa benar hubungan antara perpustakaan dan museum. Perpustakaan adalah sumber literatur, sedangkan di museum orang dapat memperoleh data langsung dari benda budaya yang menjadi koleksi. Tidak jarang masih pula diperoleh tambahan keuntungan karena mendapat bimbingan dari para pakar yang bekerja di perpustakaan maupun museum.

Selain berperanan sebagai lembaga ilmiah, museum juga merupakan tempat rekreasi. Kiranya nama julukan "gedung jodoh" cukup mencerminkannya, walaupun julukan itu mungkin kurang berkenan di hati sebagian pecinta museum, namun ia jelas menunjukkan tempatnya di hati masyarakat pengunjung museum. Pada suatu kurun waktu, museum merebut hati masyarakat melalui pertunjukkan wayang kulit, wayang golek, serta pementasan gamelan Sunda dan Jawa yang diselenggarakan oleh RRI.

Memperhatikan kisah di atas dapat disimpulkan bahwa di Jakarta telah lama ada museum yang sudah cukup memasyarakat. Tentu semua orang berharap agar museum tersebut terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam hubungan ini kadang-kadang mengherankan bahwa masih banyak yang belum memahami apa sebenarnya museum itu. Juga di kalangan yang kita sangka sudah memahami.

Perkembangan Museum di Jakarta

Dalam dua puluh tahun terakhir ini kota Jakarta telah diperkaya dengan sejumlah museum yang menyajikan beraneka kisah. Kisah sejarah perjuangan, kisah sejarah kebudayaan, kisah sejarah teknologi, serta beberapa museum khusus yang berupa memorial museum yang berhubungan dengan suatu peristiwa khusus atau seorang tokoh. Nampaknya perkembangan ini masih akan berlanjut.

Kalau kita perhatikan museum-museum tersebut, maka akan nampak suatu variasi dalam keberhasilannya untuk menarik pengunjung. Investasi untuk mendirikan sebagian museum-museum itu belum memberikan imbalan berupa peranan yang mantap dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Masih diperlukan investasi selanjutnya untuk meningkatkan berbagai segi dan bidang yang bersifat teknis dalam fungionalisasi museum. Misalnya untuk meningkatkan kemampuan teknis personil, untuk program-program yang bervariasi, dan berbagai penerbitan yang menunjang pagelaran museum pada umumnya.

Melihat berbagai museum yang terdapat di Jakarta, kita dapat melihat keanekaan "pribadi" museum-museum tersebut. Museum sejarah pada umumnya cenderung serius. Museum teknologi menarik karena menampilkan segi yang menarik bagi tua dan muda, museum etnografi

kadang-kadang menampilkan sesuatu yang misterius karena pengunjung bertemu dengan sesuatu yang tidak dijumpai setiap hari dan membawanya kembali ke akar budayanya. Museum arkeologi memerlukan keahlian yang tinggi untuk dapat membuatnya komunikatif, karena yang disajikan adalah sesuatu yang berjarak cukup jauh dalam waktu. Selain itu pada umumnya tidak didukung oleh sumber data tertulis seperti yang menjadi dasar sajian koleksi sejarah. Museum seni rupa mempunyai kekhasannya pula. Selain menyajikan kenikmatan penghayatan seni, ia juga menyajikan sesuatu yang mengundang usaha pemahaman yang bersifat intelektual. Museum ilmu pengetahuan alam mempunyai persamaan dengan museum teknologi. Yaitu menarik untuk tua dan muda. Namun dengan catatan bahwa untuk memahaminya diperlukan panduan atau bimbingan yang baik.

Setelah kita meninjau sifat-sifat berbagai museum sepintas lalu, maka timbul pertanyaan pada diri kita: sudahkah kekhasan ciri berbagai jenis museum itu dihayati oleh para pengelolanya? Bagaimanakah kekhasan itu dapat dijadikan asset dan dikembangkan menjadi kekuatan sajian museum-museum itu? Perlu dicatat bahwa dalam kenyataan terdapat berbagai nuansa dalam ciri-ciri museum. Misalnya keseriusan museum sejarah tentu berbeda antara museum sejarah perjuangan dengan museum sejarah perkembangan gaya pakaian. Museum sains yang menampilkan berbagai sumberdaya alam dan pemanfaatannya berbeda pula dalam karakteristik penyajiannya dibandingkan dengan museum sains yang berkisah tentang flora dan fauna serta evolusinya.

Dasar kita beranggapan bahwa kekhasan ciri koleksi museum adalah asset dalam penyajian ialah karena museum bagaimanapun adalah suatu tontotan. Tontonan dapat berhasil kalau dapat menangkap atau menciptakan "mood" yang tepat. Dengan demikian maka para pengunjung dapat dibimbing memasuki suasana yang tepat untuk dapat mengambil manfaat dari pameran yang digelarkan sebagai sumber pengetahuan. Suatu hal yang tidak mudah dan tidak akan berhasil seratus persen karena keanekaan latar belakang pengunjung. Namun pengelola museum harus tetap mengusahakannya dengan menentukan patokan sasaran kelompok pengunjung yang diutamakan.

Memasukkan hal-hal yang disebut di depan dalam kerangka pengembangan museum di Jakarta, maka kita lalu bertanya lagi: museum yang bagaimanakah yang harus kita kembangkan.

Kalau kita mengambil model museum Bataviaas Genootschap, maka kiranya banyak museum yang tidak cukup mempunyai sumber daya yang memadai. Baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Kita harus ingat bahwa museum Bataviaas Genootschap adalah bagian dari suatu lembaga ilmu pengetahuan. Sedangkan sebagian besar dari museum di Jakarta tidak didukung oleh kelembagaan yang berkemampuan ilmiah setaraf Bataviaas Genootschap. Bahkan ada yang hanya melibatkan kegiatan akademik pada waktu perencanaan awal sampai peresmiannya. Setelah itu tidak ada pengembangan lebih lanjut dari sumber daya yang sebenarnya menjadi sumber kreatifitas dalam pengabdian museum kepada masyarakat.

Ada sesuatu hal lagi yang kiranya perlu pula disinggung di sini dalam meninjau fungsionalisasi museum. Pada umumnya museum-museum menyandang suatu "mission". Keadaan demikian bukanlah sesuatu yang istimewa di museum. Mission itu dapat dinyatakan dengan jelas, atau tersamar. Museum-museum ABRI jelas erat hubungannya dengan Pembinaan Mental. Hal itu tampil dalam pemilihan tema pameran maupun penerbitannya. Juga kalau dilihat dari kedudukan organisasinya. Bataviaas Genootschap sebagai suatu lembaga ilmu pengetahuan secara tidak langsung memberikan masukan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan Pemerintah Kolonial. Museumnya mencerminkan pendekatan ilmiah yang difahami para pakar dalam staf museum maupun Bataviaas Genootschap. Tentu museum itu tidak mencerminkan Pancasila dan Wawasan Nusantara yang pada umumnya menjadi dasar wawasan museum kita sekarang. Khususnya museum kebudayaan dan sejarah. Dapatlah kita simpulkan bahwa museum perlu mempunyai wawasan. Wawasan itu erat berhubungan dengan 'mission" tersebut di depan.

Menyadari wawasan dan mission museum tidak kalah pentingnya dengan menyadari karakteristik museum yang berkaitan dengan jenis koleksi yang menjadi dasar kisah yang ditampilkannya.

Kalau kita perhatikan museum-museum di luar negeri kita juga akan dapat melihat alam fikiran yang menjadi latar belakangnya. Museum di negara yang berfaham Marxis akan berbeda dalam penyajian sejarahnya dengan museum di negara yang tidak berfaham Marxis. Museum-museum di Eropa masih berusaha untuk melepaskan diri dari pandangan "ilmiah"

di masa lalu sewaktu mereka masih menjadi negara kolonial. Museum-museum di Amerika dan Kanada sebagian sedang menghadapi tuntutan orang-orang Indian yang menginginkan agar mereka tidak ditampilkan hanya sebagai sesuatu yang menarik dari sudut penelitian ilmiah. Museum di Australia menghormati permintaan kalangan aborigin untuk tidak memamerkan koleksi lukisan tradisional mereka yang menurut adat tidak boleh dilihat wanita. Museum sebesar museum lembaga Smithsonian di Washington mempertimbangkan apakah suatu pameran benda ethnografi Indonesia tidak akan menyebabkan semakin merebaknya pencurian benda-benda demikian di tempat asalnya. Contoh pada museum-museum luar negeri ini menunjukkan adanya perkembangan wawasan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana dapat menjalankan mission tanpa meninggalkan kaidah-kaidah ilmiah yang menjadi rambu-rambu untuk menjamin informasi yang benar.

Mengingat bahwa jumlah dan jenis museum di Jakarta masih akan bertambah, maka sebaiknya sudah mulai dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh apa yang akan dilakukan setelah suatu museum selesai dibangun dan diresmikan. Sebenarnya setelah diresmikan barulah museum itu "hidup". Dan karenanya memerlukan kesungguhan pengelolaan dan pendanaan yang memadai. Museum yang dikelola dengan baik akan tumbuh dan semakin semarak. Sampailah kita pada pertanyaan: apakah yang dapat dilakukan oleh himpunan Museum dalam menyertai perkembangan museum di Jakarta, khususnya dalam bidang fungsionalisasi.

Peranan "Himpunan"

Suatu Himpunan Museum tentulah tidak bertujuan untuk menyeragamkan semua museum. Himpunan Museum adalah suatu forum, bukan suatu lembaga eksekutif. Sebagai forum ia dapat menyatakan sesuatu yang merupakan suara dunia permuseuman mengenai sesuatu yang relevan dengan bidang kerjanya. Pernyataan itu dapat merupakan saran kepada sesuatu fihak, misalnya pemerintah, kalangan pariwisata, atau kalangan akademik.

Sebagai forum ia juga dapat memberi sumbangan ke dalam kalangan permuseuman melalui pertemuan-pertemuan yang bersifat teknis konsultatif. Namun forum tidak mencampuri masalah kebijaksanaan. Lebih-lebih

karena museum di Jakarta berada di bawah hirarki lembaga yang berbeda-beda.

Sering terjadi bahwa seorang yang mempunyai keahlian dalam salah satu bidang permuseuman berada di Jakarta untuk jangka waktu tertentu. Himpunan dapat mengadakan pertemuan untuk para anggotanya dan mengundang ahli tersebut untuk suatu ceramah, lokakarya, atau bentuk pertemuan yang lain.

Himpunan dapat pula mengajak para anggotanya untuk bersama-sama melakukan kegiatan khusus dalam menyambut suatu peristiwa khusus yang sesuai dengan fungsi museum. Selain itu dapat pula mengajak anggotanya untuk melakukan kegiatan promosi museum, atau kegiatan lain yang khas untuk dunia museum.

Mengingat bahwa kebanyakan museum di Jakarta tidak memiliki cukup literatur professional, kiranya himpunan dapat mengusahakan suatu perpustakaan museologi melalui kerjasama dengan badan-badan yang bergerak dalam bidang kebudayaan, khususnya pelestarian warisan budaya, maupun ICOM. Perlu dipertimbangkan agar Himpunan dapat menjadi anggota ICOM. Iuran kiranya dapat ditanggung bersama oleh anggota mengingat iuran keanggotaan lembaga cukup mahal.

Pada saat ini, kesempatan tenaga teknis permuseuman untuk memperoleh peningkatan kemampuan sangat terbatas. Pada umumnya tergantung dari usaha masing-masing instansi melalui jalur birokrasi masing-masing. Jika Himpunan dapat membuktikan dirinya sebagai suatu organisasi yang bonafide, kiranya akan ada kemungkinan untuk memperoleh kesempatan sebagai penyelenggara suatu program latihan. Bahkan juga yang dilaksanakan melalui kerjasama fihak luar negeri, baik UNESCO, ICOM, atau badan dunia yang lain, maupun dengan lembaga di sesuatu negara. Untuk itu mungkin Himpunan perlu mempunyai bagian yang khusus mengelola hubungan luar negeri dan suatu bagian yang mengelola pelatihan. Bagian pelatihan dapat juga berupa panitia tidak tetap.

Sebagai forum tentunya Himpunan perlu menerbitkan suatu berkala. Selain sebagai media komunikasi antar anggota, berkala itu dapat menjadi pernyataan kehadiran organisasi di masyarakat. Kiranya hal ini perlu untuk memperoleh dukungan masyrakat.

Himpunan sebaiknya berusaha untuk membangkitkan atau menggalakkan pada anggotanya perkembangan gagasan-gagasan yang bermanfaat bagi pemantapan citra museum di Jakarta. Kiranya kegiatan Himpunan akan menjadi lebih semarak jika didukung oleh inisiatif para anggota. Termasuk di dalamnya peranan Himpunan dalam fungsionalisasi museum. Kita tidak boleh melupakan bahwa keanggotaan Himpunan adalah sukarela. Dan juga bahwa fungsionalisasi museum yang bersifat pelaksanaan kebijaksanaan merupakan masalah intern. Oleh karena itu peranan Himpunan dalam fungsionalisasi museum adalah pelayanan melalui jasa konsultasi, pelatihan, serta penyediaan kepustakaan profesional museologi. Bahkan kegiatan koordinasi program-program khusus muesum adalah suatu tindakan pelayanan. Misalnya pelayanan pemasaran dan sebagainya. Para anggota tentu dapat meminta agar himpunan secara langsung menangani kegiatan terpadu antara museum anggota dalam menyambut atau merayakan sesuatu. Dengan kedudukan Himpunan sebagai lembaga pelayanan, maka dapat dihindari tumpang tindih dengan kegiatan Kantor Wilayah, dan Dinas. Keduanya adalah lembaga eksekutif pemerintah.

Penutup

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa peranan Himpunan dalam fungsionalisasi museum adalah melayani usaha peningkatan mutu fungsionalisasi melalui peranan sebagai konsultan, penyelenggara pertemuan untuk meningkatkan kemampuan personil. Pertemuan itu dapat berupa lokakarya, seminar, maupun penataran.

Himpunan juga merupakan wadah untuk kerjasama pelaksanaan kegiatan yang memerlukan koordinasi, baik yang insidental maupun yang tetap.

Mengenai pertanyaan yang diajukan di awal sajian ini tentang museum yang kita cita-citakan dapat dijawab dengan mengatakan bahwa kita ingin mengembangkan museum yang mempunyai kemampuan ilmiah semutu dengan Bataviaas Genootschap melalui kerjasama antar museum yang dapat dikoordinasi oleh Himpunan. Namun pada dasarnya mutu ilmiah fungsionalisasi museum sangat tergantung dari konstelasi tiap museum itu sendiri. Kalau struktur dan organisasinya tidak memungkinkan pengembangannya menjadi suatu lembaga dengan kemampuan tersebut.

Suatu contoh yang baik adalah hubungan antara Lembaga Sejarah dan Tradisi ABRI dengan museum-museum ABRI. Tanpa kemampuan meneliti museum akan kehabisan kisah. Dan dengan itu habis pula pengunjungnya.

Himpunan dapat membantu sebagian pencapaian mutu ilmiah museum anggota dengan mendirikan perpustakaan museologi dengan bantuan berbagai lembaga internasional atau lembaga di suatu negara yang bergerak dalam bidang kebudayaan.

(Naskah ini merupakan makalah yang disampaikan dalam Seminar Sehari yang diselenggarakan oleh Paramita Jaya di Jakarta, Februari 1991).

MESEUM DAN SENI KRIYA

Dalam perkembangan jaman modern ini kita mengenal berbagai jenis museum. Jenis museum itu mengutamakan koleksi tertentu. Pada gilirannya jenis-jenis koleksi itu merupakan petunjuk tentang pengutamaan dalam pemikiran konseptual museum yang bersangkutan.

Pada dasarnya museum memang berhubungan dengan masa yang telah berlalu, walaupun hal ini tidak harus berarti masa lampau yang telah berlangsung berabad-abad.

Museum Penerbangan dan Ruang Angkasa di luar negeri mempunyai koleksi yang umurnya relatif masih muda, misalnya pesawat ruang angkasa, baik yang tidak berpenumpang manusia maupun yang berpenumpang manusia. Demikian pula museum lukisan Affandi.

Dalam pembahasan ini mungkin tebih tepat kalau kita lebih mendalami masalah konsepsual suatu museum, misalnya museum seni kriya atau kehadiran seni kriya di museum. Khususnya museum di Indonesia.

Kepulauan Indonesia mempunyai sejarah kehadiran manusia yang sangat panjang. Kalau diperhitungkan masa kehadiran manusia Purba seperti Pithecanthropus maka kepulauan ini sudah dihuni oleh makhluk yang membuat alat artinya berbudaya, sejak orang lebih satu juta tahun yang lalu. Di Museum Nasional tersimpan bukti-bukti kemampuan membuat alat itu. Peninggalan itu berupa berbagai jenis kapak batu. Kapak-kapak itu masih sederhana, tidak bertangkai dan jelas tidak indah. Namun di tangan manusia purba ia cukup efektif. Selama ratusan ribu tahun ia melengkapi "tool kit" atau perangkat alat mereka.

Dalam perkembangan selanjutnya manusia prasejarah membuat alat-alat yang lebih sempurna kemampuannya. Selain itu dari peninggalan yang sampai kepada kita, nampak tampil unsur keindahan. Bahkan para pakar menduga bahwa alat-alat tertentu yang menampilkan unsur keindahan dikhususkan untuk keperluan yang bersifat sakral.

Yang sampai kepada kita adalah sejumlah besar alat-alat dari batu yang telah disimpan serta dibuat dari bahan pilihan. Selain itu juga

berbagai wadah yang terbuat dari tembikar. Pemberian bentuknya menampilkan penggarapan yang berunsur estetika dan kiat mengerjakan yang piawai. Benda-benda ini sudah dapat disebut hasil seni kriya.

Tentu bukan hanya batu dan tanah liat yang pernah digunakan sebagai bahan pembuat artefak bahan lain juga ada, hanya saja tidak dapat bertahan terhadap panjangnya perjalanan masa. Lebih-lebih dalam iklim tropika lembab seperti yang umumnya terdapat di negeri kita ini.

Semakin dekat masa lampau dengan masa kini, semakain banyak benda peninggalan bukti kepiawaian tangan terampil serta naluri seni yang sampai kepada kita. Misalnya benda yang terbuat dari perunggu seperti nekara, beluing dan berbagai benda lainnya, juga alat dari besi

Dari masa dua ratus tahun terakhir sampai pula kepada kita benda-benda dari kayu dan yang amat penting adalah tekstil, Baik yang dihasilkan oleh berbagai teknik museum, maupun batik

Di manakah gerangan benda-benda tersebut berada? sebagian masih berada dalam pemilikan perorangan atau kelompok masyarakat yang menghasilkannya, atau menggunakannya. Benda-benda dari masa lampau yang tidak berfungsi lagi karena konteks kebudayaannya sudah berobah dapat disebut benda peninggalan arkeologi. Benda budaya yang masih berfungsi bahkan masih sering dihasilkan, dalam koteks kebudayaan trasdisional disebut benda etnografi.

Tidak semua benda etnografi menampilkan kadar seni yang jelas, hanya sebagian yang dapat disebut hasil seni kriya.

Apakah kepentingan museum dengan hasil seni kriya tersebut? Sesungguhnya semua benda budaya dari masa lampau yang paling jauh jika dirangkaikan dengan benda-benda budaya yang diciptakan kemudian, dan bahkan sampai masa kini, memberi gambaran tentang perjalanan manusia dalam sejarah.

Oleh awam pada umumnya sejarah hanya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh dalam peristiwa itu. Namun kurang disadari bahwa manusia sebagai keseluruhan, atau dalam kelompok-kelompok kebudayaan mempunyai kisah yang jauh lebih besar dimensinya. Kisah manusia merambah alam pemberian Tuhan untuk memperoleh tempat melangsungkan eksitensinya. Benda-benda hasil seni kriya yang diciptakan

dalam perjalanan masa adalah jejak perjalanan itu yang berupa titik-titik indah. Ia juga bukti bahwa manusia adalah mahluk Tuhan yang pilihan, tidak ada mahluk lain yang menghasilkan hal serupa.

Dalam konteks fikiran tersebut di atas museum mengumpulkan seni kriya dengan cara pendekatan objektif. Bahwa seni kriya yang terhimpun itu kemudian menimbulkan rasa bangga pada pendukung kebudayaan yang bersangkutan adalah unsur Subjektif yang positif yang dapat menjadi pendorong kreatifitas selanjutnya. Dan ini sangat penting dalam pandangan museum ke masa depan. Museum melestarikan masa lampau adalah untuk masa depan.

Pada saat kita mengutamakan pembangunan ekonommi, museum dan seni kriya banyak ditampilkan dalam jalur tersebut. Namun kiranya perlu disadari bahwa berbagai negara maju yang telah mencapai kemantapan sosial ekonomi juga berminat pada jejak-jejak perjalanan sejarah budaya Indonesia. Dengan dana dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, diusahakan memperoleh berbagai "masterpieci" seni kriya Indonesia dari masa silam. Benda-benda budaya itu diberi tempat yang terhormat dalam lingkungan khasanah dunia yang mereka miliki. Berbagai studi mendalam berdasarkan pendekatan ilmu pengetahuan modern dilakukan. Hasilnya adalah pameran di museum yang disertai penerbitan yang bertaraf tinggi. Tidak jarang hal itu membuka mata bangsa kita terhadap khasanah budaya yang kita miliki, oleh banyak orang yang selama ini tidak dianggap penting karena silau melihat hasil teknologi dan industri.

Dengan kemampuan dana dan keahlian yang masih terbatas, museum di Indonesia berusaha untuk menyusun koleksi seni kriya selain itu fihak swasta juga turut berpartisipasi dengan membuat koleksi sendiri dengan tujuan melestarikan warisan budaya tersebut. Tidak pula kalah pentingnya Khasanah yang berada dikeraton, rumah adat dan sebagainya yang masih dijaga oleh para ahli warisnya. Yang kiranya perlu dikembangkan adalah suatu kesadaran sosial yang merasa bahwa Khasanah itu adalah Khasanah milik bangsa di manapun ia berada. Seperti juga di negara yang telah maju, pelestarian warisan budaya tidak sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah menyusun peraturan perundangannya, sedang kesadaran serta kemampuan masyarakatlah yang melestarikannya.

Di kalangan permuseuman diusahakan terus peningkatan kemampuan

personil, semoga hal ini berdampak pada masyarakat, dan pada saatnya kita akan mempunyai masyarakat yang melestarikan warisan budayanya dengan penuh dedikasi dan kemampuan teknis yang tinggi. Dengan demikian tidak perlu semua itu menjadi tanggungan anggaran pemerintah serta pengaturan birokrasi yang terlalu banyak.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa seni kriya masa lampau hadir di museum sebagai jejak-jejak perkembangan kebudayaan, dan sebagai titik-titik prestasi budaya dalam perjalanan sejarah itu. Ia diharapkan memberi inspirasi pada penciptaan seni kriya dalam konteks kebudayaan Indonesia modern bahkan dalam kebudayaan dunia. Apresiasi seni di dunia semakin global. Namun hal ini juga berarti bahwa tuntutan terhadap mutu hasil seni termasuk seni kriya, sangat menentukan terhadap kedudukan kita dalam konteks global ini. Museum seharusnya menampilkan seni kriya bermutu tinggi yang dihasilkan di masa lampau sebagai contoh dari kemampuan yang pernah kita capai. Misalnya keris dengan pamor serta kerangka yang dibuat dengan indah. Sudahkah masyarakat masa kini menghasilkan sesuatu yang bermutu?

PENDIDIKAN MUSEOLOGI DI FSUI.

Pendahuluan.

Sejarah Museum :

Awal museum-museum pada masa klasik dan Renaissance - pada zaman kolonialisme, - museum setelah perang dunia II - museum masa kami.

1. Sejarah museum berawal dari peradaban Yunani Kuno. Peradaban yang menjunjung tinggi pengetahuan ini melahirkan lembaga referensi untuk pengembangan ilmu : yaitu perpustakaan dan museum. Kedua lembaga ini melestarikan sumber pengembangan ilmu dalam bentuk kepustakaan dan berbagai benda seni serta benda lain yang penting untuk ilmu pengetahuan.

2. Museum sejak awal erat hubungannya dengan masyarakat ilmu pengetahuan. Selain itu juga ada keterkaitan dengan kalangan yang berkuasa dan kaya yang menjadi penunjang kehidupan seni dan ilmu pengetahuan pada perkembangan selanjutnya museum semakin erat hubungannya dengan kalangan tersebut, dan menjadi semacam atribut. pada kalangan itu, Ia merupakan semacam ruang pamer bagi koleksi benda berharga, langka, atau aneh yang dihimpun oleh kalangan "elit". Museum pada tahap perkembangan ini tidak terbuka untuk umum. Benda-benda koleksi ditata dengan tujuan untuk menunjukkan kekayaan pemiliknya dan menimbulkan rasa takjub pada mereka yang beruntung mendapat undangan untuk menyaksikannya.

3. Zaman Renaissance yang membawa berbagai perobahan dalam masyarakat barat dan juga berpengaruh pada perkembangan museum. Walaupun belum sepenuhnya terbuka untuk umum , namun perkembangan ilmu pengetahuan serta masyarakat pendukungnya berpengaruh. Museum berkembang menjadi lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh himpunan-himpunan. Misalnya himpunan peminat seni, pemerhati masa lampau, dan peminat suatu cabang ilmu pengetahuan. Museum berkembang dari atribut kalangan tertentu, menjadi lambang tingkat peradaban suatu masyarakat, bahkan bangsa.

4. Pada kurun waktu perkembangan kolonialisme (abad 17 - 19), yang

bertepatan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang kemudian menjadi dasar ilmu modern, maka berbagai benda budaya dari kawasan yang dijajah maupun yang berbeda dengan Eropa barat mengalir ke berbagai museum di Eropa (dan juga Amerika Serikat). Koleksi museum menjadi sasaran penelitian berbagai disiplin ilmu yang sedang berkembang. Pada tahap perkembangan ini museum menunjang perkembangan berbagai disiplin ilmu yang pada gilirannya meningkatkan "gengsi" dunia ilmu pengetahuan nasional masing-masing negara di mata dunia. Selain itu juga menimbulkan kebanggan nasional sebagai negara penjajah yang dapat menampilkan bukti penaklukan kawasan-kawasan yang luas di belahan dunia yang lain. Bangsa-bangsa terjajah atau "non - barat" ditampilkan sebagai sesuatu yang unik, eksotik, berbeda, dari bangsa penjajah. Kemudian tumbuhlah museum-museum etnografi dibawah asuhan lembaga kolonial.

Pada masa itu masyarakat yang semakin terdidik, dan terbuka, mendorong untuk "menikmati" sajian museum. Maka sebagian kecil dari masyarakat umum mulai dapat berkunjung ke museum, walaupun dengan pembatasan tertentu. Pada dasarnya museum masih merupakan daerah kalangan tertentu yang eklusif dan tidak suka diganggu.

5. Pada akhir abad 19, muncul suatu hal baru dalam hubungan perdagangan internasional, yaitu diselenggarakannya Pameran Internasional berskala besar. Sebagai unsur yang dipandang dapat memberi warna khas pada pameran dagang, serta sebagai unsur yang meningkatkan gengsi kebudayaan peserta pameran, maka koleksi dari museum di berbagai negara turut ditampilkan. Para negara penjajah menampilkan benda budaya negara jajahannya, sambil mengetengahkan kepakaran para sarjananya. Pada kurun waktu ini, orang baru mulai memikirkan untuk menyajikan koleksi museum secara menarik, disertai penyelesaiannya Dan tempatnya tidak di museum, tetapi di gelanggang pameran dagang. Hal ini mempunyai dampak positif pada penyajian koleksi di museum.

6. Setelah museum terbuka untuk umum, serta tata pameran mulai berfungsi, sebagai bagian dari komunikasi, maka terjadi suatu perkembangan dalam perencanaan tata pameran. Namun perobahan itu tidak segera, membuat museum menjadi lebih komunikasi, karena yang diutamakan adalah segi estetikanya. Walau bagaimanapun meseum

menjadi lebih menarik sebagai tontotan dibanding masa sebelumnya.

7. Perkembangan yang berarti yang berdampak pada kehadiran museum di masyarakat, adalah perkembangan yang terjadi setelah Perang Dunia II. Kemajuan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial - kebudayaan, maupun berbagai cabang ilmu sains lainnya menghasilkan pemahaman baru mengenai hakekat koleksi museum yang telah terhimpun selain itu juga tersedia perkembangan komunikasi yang semakin beranekaragam. Dan semakin disadari bahwa koleksi museum mempunyai potensi yang besar sebagai sumber data. Data dapat diperoleh dari koleksi dan diolah berdasarkan pendekatan berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian terkumpul sejumlah informasi yang dapat disajikan kepada pengunjung museum khususnya dan masyarakat luas pada umunya. Sejak itu berkembang era baru bagi museum.

8. Era baru museum yang muncul pada tahun 50 an, berkembang lebih lanjut sejalan dengan perobahan politik maupun sosial budaya serta kemajuan ilmu dan teknologi.

   Perobahan politik ditandai oleh banyaknya negara jajahan yang mencapai kemerdekaan. Koleksi yang telah terkumpul di masa kolonial memperoleh makna yang berbeda bagi rakyat yang negaranya sudah merdeka.

   Perkembangan sosial budaya tampil pada peningkatan jumlah orang yang mempunyai pendidikan serta kemampuan ekonomi yang cukup. kemajuan ilmu dan teknologi membuka banyak cakrawala baru.

   Museum tidak lepas dari dampak hal-hal tersebut diatas, walapun pengarapannya tidak secepat perkembangan dalam masyarakat. Hakekat serta struktur museum mengandung rialia yang tidak mendukung reaksi yang cepat terhadap perkembangan jaman.

   Sejak tahun 60 an, ciri-ciri museun "modern" mulai tampil pada museum di beberpa negara maju, seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat. Museum tersebut berkembang menjadi museum yang lebih menekankan pada fungsi pendidikan dibanding dengan masa sebelumnya.

   Bersamaan dengan itu, museum berkembang menjadi suatu pusat informasi dan yang dilakukan adalah kegiatan komunikasi.

   Sebagai suatu pusat informasi yang berkomunikasi dengan masyarakat,

maka museum harus merumuskan kembali kebijaksanaan dasarnya. Museum tidak hanya merupakan pelestarian benda warisan budaya yang indah dan unik. Ia adalah suatu lembaga yang berkisah mengenai perjalanan hidup manusia serta seluruh lingkungannya. "A museum is a story teller" sumber kisah itu adalah koleksi.

9. Masyarakat yang semakin berkembang, serta komunikasi global yang semakin mudah berdampak pada keanekaan pengunjung museum. Museum yang berhasil menarik pengunjung dalam jumlah yang relatif besar adalah museum yang menanggapi kenyataan sosial tersebut. Kuncinya terletak pada penyajiannya yang baik, menyentuh perasaan pengunjung, dan dapat membangkitkan keingintahuan maupun rasa estetikanya.

10. Penyajian koleksi museum dilandasi oleh berbagai pertimbangan. Hal ini berhubungan dengan jenis museum yang bersangkutan. Jenis museum menentukan garis kisah (story line) yang menjadi dasar penyajiannya. Dengan demikian, maka terdapat perbedaan konsep dasar di berbagai museum yang menjadi landasan penyajian, baik dalam bentuk tata pameran maupun penerbitan hasil penelitiannya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap pengelola museum harus memahami benar hakekat, serta tujuan museum yang menjadi tanggungjawabnya. Sebuah "memorial museum" tentu berbeda dengan sebuah museum yang menyampaikan informasi umum mengenai suatu bidang tertentu. Misalnya museum yang menyajikan sejarah Departemen Perhubungan tentu berbeda dengan sebuah museum transportasi yang pertama menyajikan sejarah pengelolaan serta pengelola kegiatan perhubungan oleh suatu sistem birokrasi pemerintah, sedang yang satunya adalah sebuah museun yang menyajikan sejarah sebagaimana manusia menanggulangi masalah transportasi. Dengan demikian dapat dikatagorisasikan sebagai museum sejarah kebudayaan dimana di dalamnya terdapat sejarah teknologi, karena teknologi pada hakekatnya adalah kebudayaan juga. Ia tidak dibatasi pada sejarah kegiatan suatu Departemen. Kisahnya akan mencakup pengalaman utama umat manusia. Misalnya transportasi di berbagai kondisi geografi dan alam serta cara penggunaan berbagai sumber tenaga dalam transportasi, teknologi yang mengingininya. Semua itu masih dikemas dalam tata pameran yang menampilkan kronologi.

INDONESIA'S CULTURAL EVOLUTION

The story of Man in Indonesia began no less than thee-quarters of a million years ago, during the Pleistocene era, in the time of the great ice ages. The advancing glaciers never reached the lands of the Southeast Asian Archipelago, and the slight fluctuations in temperature which had such catastrophic results elsewhere on the planet did little to alter a local climate richly favorable to the evolution of plants and animals. Nevertheless, the region did not escape the influence of global cooling. As the earth's oceans turned to ice during periods of glaciation, the shallow archipelagic seas receded, creating land bridges linking many of the inslands to the great land masses of Southeast Asia and Australia. To and fro across these bridges went plant species, animals, and early Man.

Several types of *Homo erectus* (formerly known as *Pithecanthropus*) lived on Java between 800,000 and 500,000 years ago. They were succeeded during the later Pleistocene by other members of the genus *Homo*. It was not until comparatively recently-around 40,000 years ago-that *Homo sapiens*, modern humans, appeared.

These early Indonesians were toolmakers. The stone axes and adzes they left behind are the nation's oldest treasures. Some appear to date back to the Middle Pleistocene, but we cannot say for certain who made and used them; neither these stone tools, nor the later ones of bone and antler discovered in Upper Pleistocene fossil beds, have ever been found in conjunction with *Homo erectus* remains.

The earliest Indonesian Homo sapiens were the cave-dwelling hunter-gatherers of the post-Pleistocene era whose paintings have been found at several cave sites in the eastern islands. Scholars are still trying to grasp the significance of these paintings, working to increase our limited understanding of the culture of the time.

Following the hunting, cave-dwelling phase, humans began to exert control over their food supply through agriculture and animal husbandry. The techniques of toolmaking grew increasingly sophisticated. Substances like clay, which require a degree of processing, saw increasing use. Tools of stone and bone were not abandoned, but there was a change in the

manner of tehir making. The results were often beautiful, both on account of the materials used and of advances in craftsmanship, which frequently produced objects of remarkable quality.

The transition to a more settled way of life marks a stage in prehistoric development once generally referred to as the Neolithic, or New Stone Age. The term implies that development of sophisticated stone tools was the defining characteristic of the era. There is growing evidence to suggest that, in Indonesia at least, the use of primitive agricultural techniques was the earliest characteristic of this stage, which Indonesia scholars now refer to as *bercocok tanam*, the 'period of appropriate planting'. The record is complicated by the fact that artifacts from different sites represent varying cultural traditions, and the sequence in which cultural skills emerged may have varied from one tradition to another. Nevertheless, it is certain that material culture attained a very important stage of evolution, one that has exerted considerable influence on the forms taken by subsequent development.

Developments in the spiritual life of the period must have been similarly farreaching, and have left behind clear evidence of their importance; ruined structures of large stones, clearly religious artifacts, are scattered throughout the archipelago. Collections in Indonesian and foreign museums testify to the wealth and variety of artifacts produced in the archipelago during this period. They represent a fraction of what once existed; time has devoured the rest. Perishable objects such as baskets and textiles have long since vanished, though we can infer their existence form the evidence presented by more durable artifacts, such as clay pots. The wide variety of clay objects found is evidence of an increasing degree of control over shapes and forms and the technology of processing component materials. Mastery of the use of clay is of great significance in the cultural developments of a society.

The ease with which clay can be shaped probably did much to encounrage the development of a characteristic human trait-the appreciation of beauty. Even the utilitarian objects produced by early agrarian society were often embellished with elemens of decoration. Interestingly, the study of decorative patterns on containers in museum collections has proved to be a vital aid to understanding past cultures, enabling us to trace cultural developments over time and in different places.

Some of the decorative motifs on prehistoric ceramics were produced with implements that yielded incised patterns, circles and other designs; others were made by pressing woven basketry against the clay while the latter was still damp, thus transferring the basketry pattern to the surface of the vessel. Still other patterns appear to have been made in the same fashion, using textiles instead of basketry. By examining these patterns, scholars have concluded that Indonesian society, even at this early agrarian level, had already mastered the craft of weaving.

The study of textiles has yielded important clues in the search for a clearer understanding of Indonesian cultural development. Not only do they seem to have existed among the peoples of the archipelago from very early times, but a comparative study of textile patterns shows how, throughout history, various Indonesian ethic groups have absorbed and processed influences from many directions. The richness and depth of the Indonesian textile tradition is still being explored by sholars, and is attracting growing attention from the general public.

Many aspects of the history of Indonesia's textiles have not yet been fully understood; scholars are still collecting textile patterns and correlating them with techniques of production. Other researchers have probed the symbolism of textile patterns and froms, but this is one of the many topics concerning Indonesia's material culture on which a great deal of further research remains to be done.

With their food supply assured by agriculture and animal husbandry, the peoples of the archipelago were able to from more permanent settlements, though te movement of various ethic groups over land and sea did not come to an end.

If one looks at a map of Indonesia in the light of its history of movement, diversity and change, the arc-shaped archipelago standing between two continents and two oceans appears to open itself to migrants from the Southeast Asian mainland, its shallow, protected seas catering for the movement of traffic between the islands. Such movement would naturally be accompanied by the spread and absorption of culture, but the mechanics of the process are difficult to reconstruct. It is not always easy to determine whether a particular cultural pattern has become established in two different places because of a migration of peoples,

through the diffusion of ideas and techniques, or simply by means of coincidental invention.

As the socio-cultural evolution of a society accelerates, the exploitation and appreciation of products from other cultural spheres increases. Regional and even international trade normally develops as soon as a sufficiently mature level of agrarian society is attained. In the archipelago these developments occurred in the last millennium before the Common Era, and have left traces which can still be seen in the patterns of Indonesian culture today. It was an era of formative importance, but many questions regarding events of the time remain unanswered. The megaliths of the high Pasemah Plateau in South Sumatra, Borneo, Java, the Moluccas and Central Sulawesi still preserve the secret of their origins.

From such evidence as the fact that one of these statues is depicted carrying a bronze kettledrum *(see pp.44-45)* on its back, scholars date the megalithic images of the Pasemah Plateau to the period of early bronze culture. In fact, the remains of early bronze-working cultures are found throughout the archipelago, and many bear evidence of contact with similar cultures on the mainlad of Southeast Asia. However, images of the Pasemah type are unique to South Sumatra. Objects with distinctive stylistic features have been found all over Indonesia; it seems certain that local creativity was an integral aspect of the early metalworking period.

Scholars engaged in research on megalithic-style remains and related cultures have concluded that some prehistoric Indonesian societies reached a high level of complexity. R. von Heine Geldern, whose theories provided the basic premises for many researchers on the subject, divided megalithics into two traditions, the Old and the Young. The Old megalithic tradition coincided with the Neolithic period, the Young Megalithic with the Bronze and Iron ages. The theory is now in the process of modification by new discoveries: these larger categories appear to have subsumed number of significantly different traditions, with variations from one to another appearing regionally, or during the course of development in time.

From the remote past to the present day, religious belief and ritual have exerted a pivotal influence on the values and norms of Indonesian society. The megaliths of the *bercocok tanam* period are perhaps the earliest sacral objects to have been made on the archipelago. They appear to be connected

with a cult in which deceased ancestors were credited with the power to influence worldly events. Our understanding of prehistoric faith structures is far from complete, but we have learned enough to trace certain existing concepts of the spernatural to their roots in those times. Research into so-called contemporary megalithic cultures, such as are still found in the province of East Nusa Tenggara, has proved illuminating.

The beliefs that drove early Indonesians to erect megalithic monuments were not simply discarded when, centuries later, Hinduism and Buddhism established themselves in Indonesia. The evolution of ideas and cultural patterns through some fifteen centuries of Hindu-Buddhist civilization was, in part, a modification of faith structures which had existed here since prehistoric times. Hindu-Buddhist culture in Indonesia always displayed local elements. In its art, as exemplified by the great monuments and many smaller artifacts which make up the archaeological record, continuities with prehistory are visible right up to the end of the period.

The response of Indonesian cultures to Indian influences has been the subject of some controversy among scholars. Early archaeological studies gave little acknowledgement of any such response: it was left to philologists to discover Indonesian elements in what on first inspection seems to be a highly Indianized cultural tradition. J.L.A. Brandes, a pioneer in the field, proposed that at least ten cultural elements were of Indonesian origin: wet-field rice cultivation, a developed social organization, the shadow theater, the *batik* technique, *gamelan music*, indigenous metrical poetry, metalworking technique, original currency, astronomy and navigation. Two other scholars had representative opinions on the matter: H.G. Quaritch Wales held that Indian culture provided the stimulus without which there could be no response, whereas F.D.K. Bosch believed that learned Indonesians played a pivotal role in the development of their native arts and culture. The matter is still under study, with the rigorous program of research insti-tuted by the Indonesian goverment providing a steady stream of new insights.

By the fifteenth century of the Common Era, Indonesian societies began to feel the widespread influence of Islam. The cultural patterns associated with the new faith differed markedly from those of the Hindu-Buddhist society which had existed on the archipelago for more than thirteen

centuries. The subsequent acculturation created new Indonesian art forms, reflecting the changes demanded by Islamic teaching while incorporating within them the artistic legacy of the past. According to one legend, the *wali*, early Muslim missionaries, used *wayang*, the age-old shadow-play, as a vehicle for the teachings of Islam. Links with traditional artistic values were not weakened; the role of art in life remained strong. Works of excellence continued to be in demand, and art was as central as ever to Indonesian spiritual and cultural life. Professor Soekmono has suggested that one result of this transition, and in particular the change from Hindu-Buddhist ideas of political legitimacy to Islamic ones, was the development of the Central Javanese concept of pusaka, the sacred heirloom endowed with supernatural powers for protection.

Meanwhile, the societies of the Southeast Asian archipelago began to grow more and more interdependent. Ethnic groups had moved freely among the islands since prehistoric times, but now they cohered with one another to create a unit, at least in the form of a commercial territory. From Chinese sources we can infer that this unity had a linguistic correlate: an ancestor of Bahasa Indonesia, the modern Indonesian language, had been in use throughout the archipelago for centuries. The foundations of the Indonesia we know today were being laid.

The fusion of Islam with the antecedent cultures of Indonesia gave impetus to a new phase of development. Great centers of power in the tradition of Srivijaya and Majapahit were conspicuous by their absence during this phase. Instead, political and economic power was dispersed throughout the archipelago among smaller centers whose rise was linked to the spice trade. In time, the balance of power would again swing in the direction of Java; meanwhile, Aceh, Makasar, Ternate, to name only a few, grew wealthy and powerful on the lucrative exchange.

The burgeoning spice trade attracted the attention of the great powers of Europe. If earlier foreign ifluences had been beneficent, this one tended to have the opposite effect. In many cases, European military and economic activity disrupted processes of acculturation that had continued uninterrupted for centuries. Many *kraton*, for example, lost their role as independent centers of culture at this time. In the beginning only Java and part of Maluku were occupied, but gradually other areas, too, came

under the rule of the colonialists. Some were almost entirely absorbed into the colonial economy. Even so, the power of Europe did not affect all parts of the archipelago equally. While 'pacification efforts', generally the means through which territories were subsumend by the main colony, continued into the early twentieth century, in places deemed less important by the Europeans traditional life continued as before under the watchful eyes of the colonial navy.

The history of the archipelago has captured the imagination of experts and lay persons alike. Their scrutiny is no recent phenomenon. Notes on conditions in Indonesia appear in the annals of dynastic China as early as the fifth century CE; these, and the records of other nations who traded with Indonesia, provide vital clues to the history of a region which yields few indigenous written records.

Efforts to understand Indonesian history and culture through the methods of Western scholarship began in the eighteenth century with philological research and later extended to archaeological activity. In the context of these early studies the Batavian Society of Arts and Sciences was founded on 26 April 1778. It early aims were severely practical: namely, to undertake researches which would benefit the agriculture, commerce and welfare of the colony. In its earliest development the Society had no plans to form a museum, although J.C.M. Radermacher, its founder, donated a collection of curios. Instead, the pride of the Batavian Society was its library, which eventually became one of the largest in Southeast Asia.

By degrees, however, Radermacher's collection grew into the Museum of the Batavian Society. After moving several times, the institution finally established itself at Merdeka Barat in 1868. A special building was to be constructed on the Koningsplain (now Merdeka Square) to house not only the museum but the Society's offices and library and the offices of the Archaeological Service as well, but this ambitious plan was interrupted by the outbreak of the Secound World War.

In 1960 the Society ceased to exist. Both the museum and the library lost the support of a scientific institution. Under the administration of the Department of Education and Culture, they began to develop a new role as repositories of public assets and resources. The process reached its

culmination when, in 1979, the eartwhile museum of the Batavian Society became the Indonesian National Museum.

Two centuries after its foundation, the Museum possesses a collection of over 200,000 objects. For a national museum this total is actually rather low, but the collection contains a great many unique and valuable objects. Some can no longer be found at their places of origin, while others are of a quality no longer available in those places. Examples abound in the ethnographic collection, with its fine examples of basketry, woodcarving, weapons such as keris and *mandau*, ornaments and ritual objects made from precious metals and decorated with precious stones, and an extensive collection of textiles, many of which are now very rare.

The collection impresses upon us the richness and variety of the cultures of Indonesia. We also realize how many of these often beautiful objects no longer exist, because the values which formed the context of their creation have declined, causing us to let go of the ability and skill required to produce them.

The collection is, in fact, the priceless record of a culture originating in the experience of people who have inhabited these islands since prehistoric times. It is, indeed, the 'cultural pusaka' of the Indonesian people. Although their original social functions may have lost their relevance in the contemporary world, these artifacts are still a part of the present, for the present grows out of the past. As we have seen, a fine thread of continuity runs through the history of Indonesia"s culture from prehistory to the present. Here are the witnesses to that continuty.

(Dipetik dari : Pusaka Art of Indonesia, Singapure, Archipelago press, 1992 hal : 19-24).

PHASES OF EARLY INDONESIAN HISTORY

In the early 20th century the Dutch scholar N.J. Krom introduced the term "Classic" to designate the period from the beginning of Indonesian history to the conversion to Islam. He divided the classic era into the Central Javanese and East Javanese phases. This periodezation continued to be widely used among archaeologists, but disputes exist regarding both the appropriateness of the terms and their precise meanings.

Reseach and Evidence

Arshitectural remains of candi show that in the early historic period some Indonesian societies conducted a dialogue with sources of knowledge, especially religious, and other cultural elements originating outside their local areas. Although cultural remains bear marks of foreign influence, inscriptions and literary sources depict a society which evolved on the basis of indigenous values and norms formed before Hindu and Buddhist influences arrived. The search for the factor which stimulated the development of early historic Indonesian societies, formerly focused on disontinuity and the appearance of non- Indonesian elements, has now shifted its emphasis to continuity between historic and prehistoric elements.

Periodization based on clear criteria for the course of ancient Indonesian history still requires further research. At this moment, the channel in which ancient history flowed is still marked by historians' maps of royal dynasties. This method obviously contains a weakness in that it cannot present an integrated narrative. The connecting thread linking times and places still needs to be identified. Conventionally, the antiquities of Java were divided into the Central Javanese and Eastern Javanese periodes. It is now felt that this division is inappropriate because there are examples of temples in east Java, such as Candi Badut, which date from the early period, and conversely there are temples in central java, such as Candi Sukuh, which belong to the very Late Calssic. To overcome this Soekmono uses the terms Early Classic style and Late Classic style, based on architectural decorative motifs. Early Classic, which lasted from circa 700-900 AD, is typified by strong emphasis on horizontal mouldings

and particularly in the example of Hindu temples, the use of tapering, multi-storeyed roofs. Major decorative elements were placed at the corners and mid-points of each tier of the roof mouldings. In the Late classic style, which began in the 13th century, the use of perspective effects was taken much further than before. The temple bodies were somewhat decreased in size, and the temple bases became higher. Roofs became even taller with many more tiers, and much smaller corner ornaments. These towers were also very unstable and tended to fall down. The late classic style first appears with Candi Kidal, which preserves no elements at all of the Early Classic style. There is an unexplained gap of over 300 years between the Early and Late Classic styles of architecture.

Stylistic Changes

Because of the absence of inscribed dates, art historians and archaeologists have had to rely on stylistic changes to date Javanese works of art. A number of fixed elements were found on most Javanese temples. these standard elements however did not remain static throughout the long Classical period; they gradually evolved through certain stages.

The technique of seriation is well established in archaeology and art history, though it is subject to certain complications. It is assument that most art motifs follow a similar trajectory, from the evolution of a simple introductory form through a phase of increasing elaboration to a peak of complexity, and then through a period of declining popularity during which the motif is again simplified, before it becomes extinct. There is, however, the problem of archaism in which an old motif is revived after a period of neglect. It is also common for some areas to retain art forms which have been abandoned elsewhere.

One of the main elements exploited to date Javanese classical art has been the mouldings of the temple foot. These were complicated patterns of flat, semi-circular, and bell-shaped projections which underwent a well-defined process of evolution over time. Another motif was the kala head found over the entrances to temples and above niches for statues. Often the kala was combined with the *makara*. The *kala* heads of the Early Classic period were depicted without a lower jaw, in conformity with Indian literary tradition. In the Late Classic the kala was often given

a lower jaw, and portrayed in an increasingly stylised manner. The *makara* vanished.
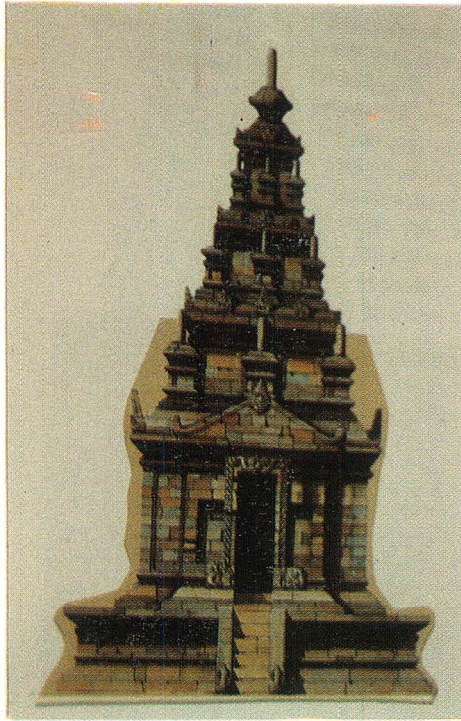
GEDONG SONGO:

An example of the Early Classic style of architecture, built in the mid-8th century in north central Jaya. The spires on this temple are sometimes called false lingga (lingga *semu*). The elaborate bases for these spires accentuate the horizontal roof tiers. The temple has a projecting vestibule with a separate roof, another Early Classic feature.

CANDI JAWI:

Atypical example of Late classic architecture, built in east Java around 1300 AD and repaired after a lightning bolt struck its pinnacle in the mid 14th century. The roof is decorated with antefixes on a much smaller scale, with proportions which accentuate its height.

Sumatra and Bali

Neither Sumatra nor Bali can be fitted into this framework. Bali has its own brand of architecture seen in the candi form of buildings carved into cliffs, for example at Gunung Kawi, from the late 11th century. The candi bodies of Gunung Kawi display similarities to the Early Classic of Java, while the roofs are more like those of the Late Classic. The overall impression of Sumatran of Sumatran Classic architecture is reminiscent, of Javanese Late lassic Style. The overall impresion of Sumatran classic style impression. However, Sumatran candi still have *makara* decorations at the bottom of the stairs, an element found in Javanese Early Classic.

Social Evaolution

When inscriptions first make their appearance in Indonesian history, between the 6th and 8th centuries, they depict a culture that already contained both Hindu and Buddhist elements, and that was in the process of consolidation around a few main centres of power. Apparently the ancestors previously associated with power had been replaced by gods. Although power was becoming centralised, it is quite possible that real authority still depended on the voluntary submission of the populace.

Dynastic formation

In the next stage it became possible for dynasties to form. In central Java candi associated with rajas or dynasties became increasingly common. The ruling class clearly appears at this time, distinct from the main population. The mass of society was still governed by the traditional system in which leaders were only *primus inter pares*, resolving affairs according to local custom.

Then something happened which cannot be satisfactorily explained: the capital moved form central to east Java. A variety of causes may have been responsible; volcanic activity in central Java, increasing population and trade in the east. This shift was accompanied by social evolution. governmental organisation became stronger, including provision for communication between court and villages. Complex bureaucracy arose.
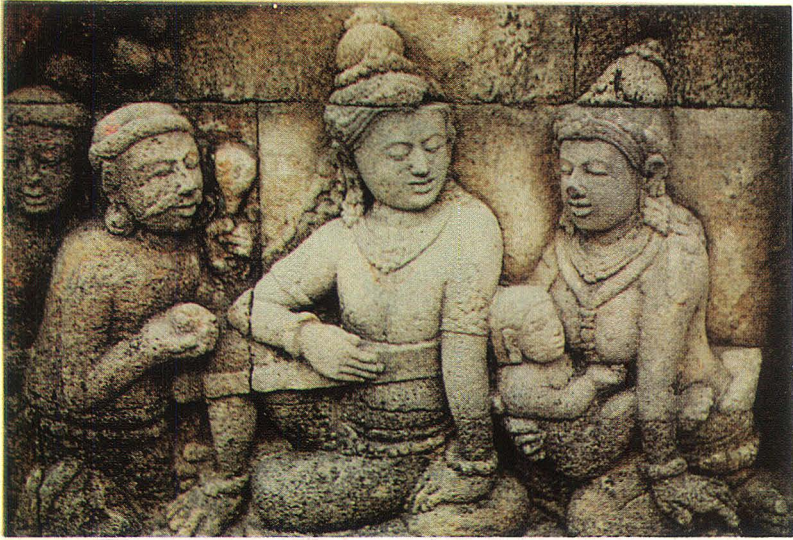
Early Classic relief carving from Borobudur displaying the naturalistic, rounded style of the Early Classic period.

The End of Antiquity

During the period between 1500 and 1800 various outside powers were beginning to extend their presence in the region: Europeans, West Asians, and East Asians. The most prominent feature of this period is the spread of Islam. Areas which had previously been unimportant emerged due to their role in expanding trade and spreading Islam.

Islam brought with it a great number of social changes. However many of the cultural traits that had been formed in ancient times were not immediately replaced. In areas where Indian influence had never appeared, social forms which had developed uninterrupted since prehistory continued to evolve, however sometimes in adaptation to Islam. Despite the great number of external influences, local cultural evolution has continued along different paths in various parts of Indonesia through Independence and right up until the present.

Dipetik dari : Indonesian Heritage: Ancient History. Singapore, Archipelago Press, 1996 Halaman 42-43.

PERIODS OF INDONESIAN PREHISTORY

Historians are not merely interested in recording the past. A simple list of dates, names, and events would hold no interst and would be of no functional value. The main goal of scholars who study the past is ti search for pantterns of behaviour and to draw conclusions regarding the cause and effect relationships which recur at different times and in different places.

The Periodization Problem

One of the goals of those who study the past is to identify time periods marked by a few strong cultural traits. In Europe the Dark Ages, the Mediaeval Period, the Renaissance, and the Enligtenment, have been identified as historic periods. The prehistoric period is divided into ages named after types of techonogy: Palaeolithic (Old Stone Age), Mesolithic (Middle), Neolithic (New Stone Age), Bronze Age and Iron Age.

In Indonesia there are traditional genres of writing which deal with the past. These include categories such as *hikayat*, *babad*, and *tambo*, all of which constitute treasuries of traditional perceptions of the past held by different groups in the archipelago. These genres do not divide the past into time periods; instead they stress continuity and the cyclical nature of historical events.

During the 19th century, Western researchers began to investigate Indonesia's history using approaches based on the assumption that the different stages characteristic of the European sequence of development could be universally applied. They began collecting historical sources exploited were literary and epigraphic. Only later was this followed by archaeological research on the many *candi*. Prehistoric research only began in the 1920s.

Developing a Chronology

Periodization of Indonesian prehistory would enable us to observe and understand historical developments as processes rather than random collections of dated events. Researchers initially copied the system

employed in Europe, based on technology. Cultural change was assumed to be due to migration. In the early 1920s the first prehistoric research in Indonesia was limited by lack of qualified personnel.

Pioneers in this field, P.V. van Stein Callenfels, A.N.J. Th. a Th. van der Hoop, and H.R. van Heekeren, for example, used the periodization of Palaeolithic, Mesolithic, Neolithic, Bronze, and Iron Ages (sometimes combining bronze and iron into one early Metal Age).

In Indonesia a special phase was introduced, termed Megalithic, In Europe, such remains were also present, but no separate period was defined on their basis. This was partly due to the fact that they were not as widely distributed in Europe as in Indonesia. The distibution of megalithic remains in Indonesia signifies a special cultural pattern, which was at first thought to have constituted a unique chronological phase of development.

To clarify many issues in Indonesia prehistory, it was necessary to wait until after Wordl War II, when progress was made in several areas, including both theory and also techniques such as radiocarbon and other forms of absolute dating. The status of the 'Megalithic' phase has been re-evaluated. It is now recognised that a "living' megalithic tradtion still exists in many parts of Indonesia as a legacy of the prehistoric era. This raises the question of whether a division based solely on technology can properly represent the dynamics of cultural evolution. Many discoveries are known of 'Neolethic' elements which persisted into the period of metal-using society. It is also suspected that Mesolithic-style artefacts persisted and continued to form parts of assemblages which would be termed Neolithic on stylistic grounds.

It is clear that the older periodization of Indonesia's prehistory is not acceptable. The European periods were defined on the basis of links between the material used for tools and other cultural subsystems: political and economic structures, for example. Archaeologists have now discovered that the correlation between technology and wider spheres of culture in European prehistory does not appear to be accurate for Indonesia.
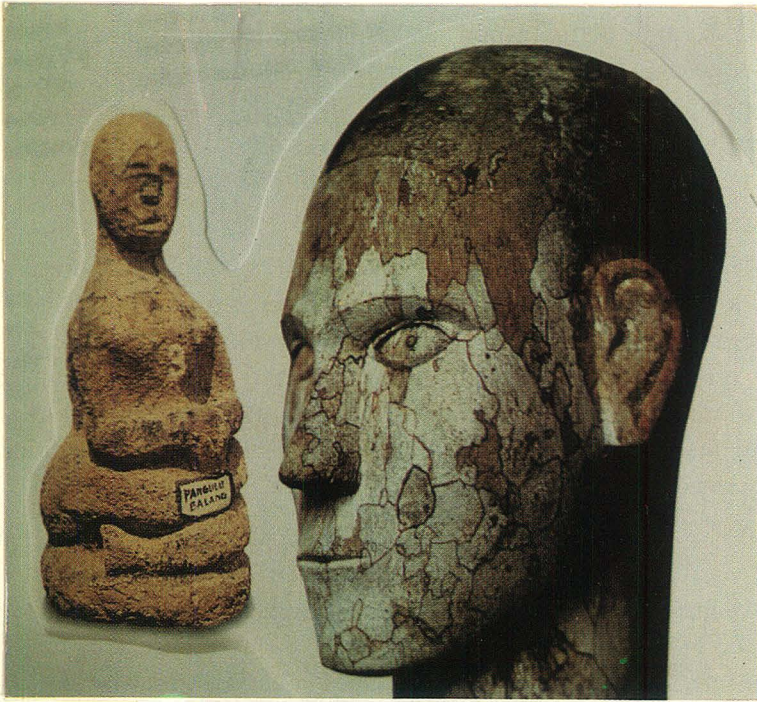
Batak Pangulubagan statue from Sumatra (left) anda Toraja tau-tau from Sulawesi. these statues are so similer to the sculpture of the Pacific islands that they are usually termed 'Polynesian-style'. The practive of placing such statues, made of wood or stone, near villages for protection was still found in almost all parst of Indonesia in the 19th century. They are an example of continuity of style and function which makes periodization of Indonesia's past difficult.

The Indonesian Model

A new system of periodization for Indonesian prehistory had to be created. R.P. Soejono, Indonesia's most famous prehistorian, has suggested a three-stage periodization to take account of these possibilities: a Hunting-Ganthering period, succeeded by an Agricultural Period, and finally a Craftsmanship Period. This system can be further developed by identifiying sub-divisions within each period.

This model was based on traditional models, and needs further testing in the field. It is necessary to obtain comparisons with other models, and more absolute dates. The goal of this model is to place greater stress on the often complex relationship between the enviroment, humans, and culture rather than one variable, technology. However this model is still close to the old one, and more time is needed before its usefulness can be discerned.

Prehistoric Indonesian societies during the transition to the historic period were in the Agricultural Period or the following Agriculture and Metal-Using Period. Research shows that society had become complexly organised by this time, with an institutionalised stratification and leadership system. The leaders and their assistans were responsible for society's preservation and welfare. In this system leadership was based on trust rather than inherited authority. Those who demonstrated their abilty to lead received respect, and honours after death, as shown by burial offerings found in the Agricultural Period and in the Craftsmanship Period. Ritual sites with groups of megaliths, and slab graves with painted walls indicate more than primitive efforts to display this respect. During this time social units were forming which developed into the kingdoms of the Archaic age.

INDONESIAN PREHISTORIC PERIODIZATION

Hunting-Gathering Stage. The societies that developed at this stage inhabited lowland areas. Their principal artefact forms were chopping tolls, flakes, and bone tools. People lived in small bands of four to five families (consisting of about 20-30 people). They migrated seasonally from one resource zone to another. At a certain time of year they possibly met other

bands for ceremonial activities. Tools were few and simple, enabling people to move frequently.

Epi-Palaeolithic and Hunting period. During this period groups mainly inhabited caves. They produced blades and stone tools. Some groups became more specialised in hunting certain prey, and gradually developed more varied tool kits to fit particular activities. A wide variety of plants and aquatic foods such as fish, shellfish, and aquatic birds and mammals become more important in the diet. Some groups became semisedentary. Bone tools were also used.

Agricultural Stage:

This period saw the development of a Neolithic tradition. People started living in permanent villages with populations of 300 to 400 people. Some sections of the population were still inhabiting caves. Technology was changing and stone tools were being produced using new techniques such as grinding and polishing. The main kinds of artefacts included axes, adzes and ground bracelets, and also blades. Pottery storage vessels were made to store food and seeds for replanting. Beads were also created for decoration. People probably practised cults of the ancestors and natural forces, and learned how to domesticated crops and animals. Some groups appointed leaders, the beginning of a political system.

Craftsmanship Stage.

Metalworking began. Iron and bronze may have been introduced almost simultaneously. These new material eventually became symbols of status, as social hierarchies became differentiated. Long distance trade in metals including both are and finished products developed. Gold was used for jewellery and burial offerings. Sacred monuments using large stones set on terraces began to be constructed. (After Soejono)

Dipetik dari : Indonesian Heritage: Ancient History. Singapore : Archipelago Press, 1995. Halaman 10-11.

BIO DATA

DRS. BAMBANG SUMADIO, almarhum, dilahirkan di Kendal, Jawa Tengah, 16 Nopember 1929. Tanggal 17 Pebruari 1959 menikah dengan Sri Rondiati dikaruniai 4 anak; Widyawati (17 Juni 1960), Widyatmoko (28 Juni 1962), Gatut Widyasena (3 Mei 1966) dan Widyayosita (12 September 1967). Pada tahun 1961, almarhum menamatkan pendidikan terakhirnya di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jurusan Ilmu Purbakala dan Sejarah Kuno.

Pada masa perjuangan, tahun 1945 almarhum ikut dalam Perang Kemerdekaan I dalam Pasoekan Pelajar Indonesia Merdeka Atau Merdeka (IMAM). Kemudian masuk menjadi anggota Brigade VIII dan brigade XVII di Purwokerto. Selama Perang Kemerdekaan II, beliau masuk dalam rombongan gerilya yang dipimpin oleh Panglima Besar Soedirman. Pada tahun 1949 hingga dimobilisasi (1951) dalam Corps Polisi Militer Batalyon BS IV di Jakarta.

Pengalaman pekerjaan, pada tahun 1959 menjadi Asisten Perguruan Tinggi di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Pada tahun 1961 sampai akhir hayatnya almarhum sebagai dosen tetap di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Tahun 1967 beliau pernah menjadi Asisten Bidang Kebudayaan pada Kantor Penghubung RI di Kuala Lumpur, dan kemudian dilanjutkan sebagai Atase Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur hingga tahun 1969. Pada tahun 1975 sampai tahun 1984 menjadi Kepala Museum Nasional. Dan terakhir pada tahun 1984 sampai tahun 1991 menjabat sebagai D... Direktorat Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Depa... Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Selama memegang jabatan Di... di Direktorat Permuseuman almarhum banyak mengikuti seminar/loka... baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu beliau juga pernah m... koordinator Pameran KIAS di Amerika Serikat. Dan terakhir beliau ... menjabat sebagai staf ahli di Yayasan Nusantara Jaya khususnya di b... pengembangan sumber daya manusia di bidang permuseuman, sehingga adanya proyek "Indonesia Museum Development Project" untuk tenaga-tenaga museum belajar ke USA.